

**PELAKSANAAN CSR (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)
PT. CHEIL JEDANG INDONESIA DI KABUPATEN PASURUAN
DALAM PERSPEKTIF *GOVERNANCE***

SKRIPSI

**Untuk Dapat Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dengan
Minat Utama Metode Ilmu Politik**

Oleh:

**DIMAS BRILIANTO
NIM. 105120500111040**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

HALAMAN PERNYATAAN

Nama: Dimas Brilianto

NIM. 105120500111040

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

**PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* PT.
CHEIL JEDANG INDONESIA DI KABUPATEN PASURUAN
DALAM PERSPEKTIF *GOVERNANCE***

adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 12 Juli 2018

Pembuat pernyataan,



Dimas Brilianto

NIM. 105120500111040

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam-dalamnya atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga Penulis dapat melaksanakan Penelitian Skripsi dan menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul:

PELAKSANAAN CSR (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) PT. CHEIL JEDANG INDONESIA DI KABUPATEN PASURUAN DALAM PERSPEKTIF *GOVERNANCE*

Penelitian ini berdasarkan pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan. Adapun tujuan dari Penelitian Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

Sehubungan dengan selesainya penulisan Skripsi tersebut maka perlu penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sholih Mu'adi SH, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
2. Ibu Juwita Hayyuning Prastiwi S.IP, M.IP selaku Dosen Pembimbing pertama dan Bapak Faqih Alvian S.IP, M.IP selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat dengan baik dan sabar sampai selesainya Skripsi ini.
3. Seluruh dosen yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan staf program studi ilmu politik yang membantu proses terselesaikannya Skripsi ini.

4. Kedua Orang tua dan Keluarga penulis, yang telah memberi dukungan dan doa-doanya yang tiada henti serta kesabarannya dalam menunggu kurang lebih selama 8 tahun agar Penulis dapat memperoleh gelar Sarjana.
5. Teman-teman se-perjuangan baik dari jurusan Ilmu Politik maupun dari luar Universitas Brawijaya yang telah membantu proses penelitian dan penulisan Skripsi ini dan selalu mengingatkan Penulis dikala Penulis merasa malas. Juga semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang juga membantu dan mendukung hingga selesainya penelitian dan penulisan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam Skripsi ini dan masih jauh dari kata sempurna. Saran serta kritik yang membangun sangat diharapkan untuk membantu menyempurnakan karya ini.

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PT. CHEIL
JEDANG INDONESIA DI KABUPATEN PASURUAN
DALAM PERSPEKTIF *GOVERNANCE***

SKRIPSI

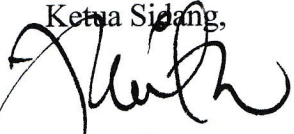
Disusun Oleh:

DIMAS BRILIANTO
NIM. 105120500111040

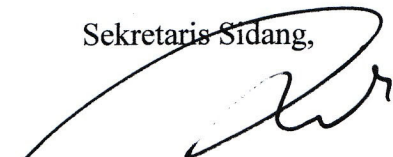
Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam Ujian Komprehensif
pada tanggal 4 Juli 2018

Tim Penguji,

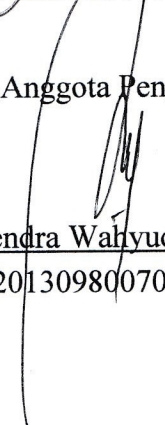
Ketua Sidang,


Juwita Hayuning, S.IP., M.IP.
NIK. 2012088507072002

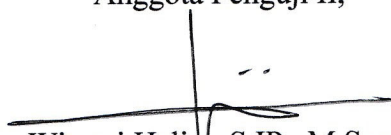
Sekretaris Sidang,


Faqih Alfian, S.IP., M.IP.
NIK. 2014058612161001

Anggota Penguji I,



Tri Hendra Wahyudi, S.IP., M.IP.
NIK. 2013098007071001

Anggota Penguji II,


Wimmi Halim, S.IP., M.Sos.
NIK. 2016079007041001

Malang, 12 Juli 2018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 196903141994021001



LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* PT. CHEIL
JEDANG INDONESIA DI KABUPATEN PASURUAN
DALAM PERSPEKTIF *GOVERNANCE***

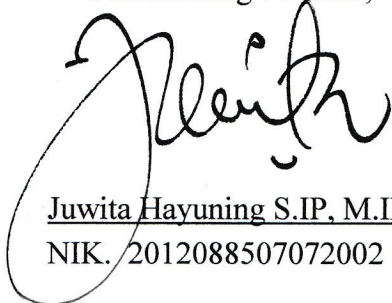
SKRIPSI

Disusun Oleh:

**DIMAS BRILIANTO
NIM. 105120500111040**

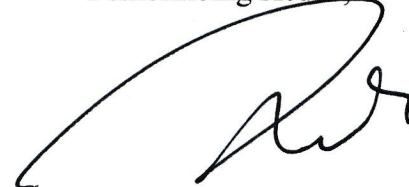
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing Pertama,



Juwita Hayuning S.IP, M.IP.
NIK. 2012088507072002

Pembimbing Kedua,



Faqih Alfian, S.IP., M.IP.
NIK. 2014058612161001

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
LEMBAR PENGESAHAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
HALAMAN PERNYATAAN.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
ABSTRAK	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
ABSTRACT	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
KATA PENGANTAR.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
DAFTAR ISI.....	1
BAB 1	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PENDAHULUAN.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.1 Latar Belakang	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.2 Rumusan Masalah	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.3 Tujuan Penelitian.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.4 Manfaat Penelitian.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BAB 2	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
TINJAUAN PUSTAKA	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.1 Tinjauan Teoritik	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.1.1 Governance	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.2 Kerangka Konseptual	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.2.1 <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.2.2 Kebijakan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.3 Penelitian Terdahulu.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.4 Alur Pemikiran	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BAB 3	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
METODE PENELITIAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
3.1 Metode Penelitian	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
3.2 Lokasi Penelitian	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

3.3 Fokus Penelitian	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
3.4 Sumber Data	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
3.5 Teknik Pengumpulan Data	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
3.6 Teknik Analisis Data	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BAB 4	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
GAMBARAN UMUM	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
4.1 Gambaran Umum PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
4.1.1 Program dan Kegiatan CSR PT. CJI di Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2018..	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BAB 5	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PELAKSANAAN CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PT. CHEIL JEDANG INDONESIA DI KABUPATEN PASURUAN: DESKRIPSI MELALUI PERSPEKTIF GOVERNANCE	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
5.1 Relasi Pemerintah dan <i>Civil Society</i> Dalam Pelaksanaan CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) PT. Cheil Jedang Indonesia Di Kabupaten Pasuruan	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
5.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) PT. Cheil Jedang Indonesia Di Kabupaten Pasuruan	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BAB 6	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PENUTUP.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
6.1 Kesimpulan.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
6.2 Saran.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
DAFTAR PUSTAKA	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

ABSTRAK

Dimas Brilianto. Program Sarjana. Program Studi Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya, Malang, 2018. Pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan Dalam Perspektif Governance. Tim Pembimbing: Juwita Hayuning Prastiwi, S.IP., M.IP. dan Faqih Alfian, S.IP., M.IP.

Penelitian yang berjudul pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan Dalam Perspektif Governance. Penelitian ini lebih berfokus pada relasi pemerintah dan *civil society* dalam pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan tahun 2016-2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana relasi pemerintah dan *civil society* dalam pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan. Dalam penelitian ini, metode yang dipakai adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif, pada pengumpulan data: wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purpose sampling*, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah mengumpulkan data yang diperlukan, mereduksi data yang telah didapat, menyajikan data dengan bentuk uraian singkat, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini terdapat relasi dari pemerintah dan *civil society* dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan dan terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan.

Kata Kunci: *Governance, Corporate Social Responsibility*

ABSTRACT

Dimas Brilianto. Graduate Program. Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, University of Brawijaya, Malang 2018. Implementation of CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Cheil Jedang Indonesia in Pasuruan District on Governance Perspective. Advisors: Juwita Hayuning Prastiwi, S.IP., M.IP. and Faqih Alfian, S.IP., M.IP.

The research entitled the implementation of CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Cheil Jedang Indonesia in Pasuruan District in Governance Perspective. This study focuses more on government and civil society relations in the implementation of CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Cheil Jedang Indonesia in Pasuruan Regency in 2016-2018. This study aims to find out how the relation of government and civil society in the implementation of CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Cheil Jedang Indonesia in Pasuruan Regency and know the supporting and inhibiting factors of CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Cheil Jedang Indonesia in Pasuruan Regency. In this research, the method used is descriptive qualitative approach, on data collection: interview, observation and documentation. The sampling technique used in this research is purposive sampling, while the data analysis technique used is collecting the required data, reducing the data already obtained, presenting the data with a brief description, and drawing conclusions. In this research there are relation from government and civil society in planning process and implementation of CSR (Corporate Social Responsibility) program and activity of PT. Cheil Jedang Indonesia in Pasuruan Regency and there are several supporting and inhibiting factors in the implementation of CSR (Corporate Social Responsibility) program and activities of PT. Cheil Jedang Indonesia in Pasuruan Regency

Keywords: *Governance, Corporate Social Responsibility*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan di dunia bisnis, ternyata perusahaan tidak hanya berbicara mengenai keuntungan dan kegiatan produksi belaka. Keberlanjutan suatu perusahaan dapat dicapai apabila perusahaan tersebut memperhatikan keinginan, kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut *CSR (Corporate Social Responsibility)*.¹ Kajian *Corporate Social Responsibility (CSR)* tersebut semakin berkembang pesat seiring berjalannya waktu dan seiring banyaknya kasus yang terjadi dimana perusahaan tidak memberikan kontribusi positif secara langsung kepada masyarakat.²

Corporate Social Responsibility (CSR) atau bisa diartikan dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu program dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat baik di dalam maupun di luar perusahaan, karena suatu kegiatan produksi biasanya menimbulkan dampak yang negatif kepada lingkungan sekitar, atau juga bisa dikatakan sebagai timbal balik kepada lingkungan sekitar atas kegiatan produksi yang menguntungkan di suatu perusahaan. *CSR* juga dibuat untuk mengurangi

¹ Eny Suastuti, *Beberapa kendala dalam penerapan csr (analisis pasal 74 uupt)*

² Megawati Cheng dan Yulius Jogi Christiawan. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Abnormal Return. Jurnal akuntansi dan keuangan, vol. 13, no. 1, mei 2011: 24-36

kesenjangan sosial antara perusahaan dan lingkungan sekitar, semakin besar suatu perusahaan maka peluang terjadinya kesenjangan sosial antara perusahaan tersebut dan lingkungan sekitar juga semakin besar. Perusahaan yang menerapkan *CSR* akan mendapatkan respons yang positif dari masyarakat sekitar dan juga dari pelaku bisnis. Melalui *CSR* perusahaan tidak hanya mengutamakan kepentingan bisnisnya sendiri melainkan juga melihat aspek sosial di lingkungan sekitar, maka dari itu *CSR* sangat dibutuhkan untuk menciptakan citra yang baik bagi suatu perusahaan. Dengan kata lain, *CSR* juga bisa digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur reputasi suatu perusahaan.

Konsep *CSR* pertama kali dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953, awalnya *CSR* hanya bersifat ‘filantropi’ yaitu dorongan kemanusiaan yang bersumber dari norma dan etika untuk menolong sesama dan memperjuangkan perataan sosial, namun kini *CSR* menjadi konsep yang wajib dilakukan oleh perusahaan untuk peduli terhadap kesejahteraan masyarakat serta keseimbangan lingkungan.³ Praktik pengungkapan *CSR* mempunyai peranan penting bagi perusahaan karena perusahaan berada di lingkungan masyarakat dan aktivitasnya pun memiliki dampak terhadap sosial maupun lingkungan. Dengan demikian pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan alat yang digunakan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Selain itu juga, pengungkapan *CSR* dipandang sebagai wujud akuntabilitas perusahaan publik

³ Rilla Gantino. *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2014*. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol. 3(2), 2016, pp 18-31

untuk menjelaskan berbagai dampak permasalahan sosial yang timbul di perusahaan.

Agar tujuan tersebut dapat berjalan dengan baik. Pemerintah membuat kebijakan tentang CSR yaitu Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pada Pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa : *“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”*.⁴ Setelah disahkannya UU tersebut pelaksanaan CSR di Indonesia mulai meningkat. Selain Undang- Undang tersebut terdapat juga Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, PP tersebut melaksanakan ketentuan Pasal 74 UU No.40/2007, kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.⁵ Kebijakan selanjutnya yang mengatur tentang CSR di Kabupaten Pasuruan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 31 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan, seperti pada pasal 7 yang menyebutkan bahwa :

“Setiap perusahaan yang memiliki ukuran usaha, skala dampak lingkungan, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan tertentu wajib melakukan penganggaran dana untuk program TSP (tanggung jawab sosial perusahaan) bagi masyarakat di Kabupaten Pasuruan”.⁶

⁴ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor .40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 31 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Kemampuan pemerintah menghasilkan produk kebijakan belum tentu selaras dengan kemampuan pemerintah melaksanakannya. Terdapatnya keterbatasan tersebut dapat diminimalkan dengan melibatkan swasta dan masyarakat madani (*civil society*). Sektor swasta terutama sektor industri yang menggunakan sumber daya alam dalam menjalankan usahanya diharapkan agar dapat lebih meningkatkan perannya dalam mengatasi permasalahan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.⁷

Corporate Social Responsibility (CSR) selalu berkaitan dengan pemerintah dan masyarakat, yaitu pemerintah selaku pembuat kebijakan dan masyarakat selaku penerima program dan kegiatan CSR itu sendiri. Sedangkan dalam pelaksanaannya pun CSR tidak lepas dari bantuan pemerintah dan juga masyarakat madani (*civil society*), hal tersebut sesuai dengan konsep pemerintahan (*governance*) yang memiliki 3 pilar utama yaitu Pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani (*civil society*).

Perbedaan antara konsepsi pemerintahan (*governance*) dan pola Pemerintahan yang tradisional adalah terletak pada dikurangnya peran Pemerintah dan peranan masyarakat termasuk dunia usaha ditingkatkan.⁸ Hal tersebut dapat dilakukan sektor swasta dengan memberikan program dan kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) kepada masyarakat, dan masyarakat madani

⁷ Muhammad Rudi Rumengan. *Pengentasan kemiskinan melalui tanggung jawab sosial perusahaan*. www.kompasiana.com. Diakses pada 12 Desember 2017

⁸ Sedarmayanti, 2012. *Good Governance. Pemerintahan Yang Baik Bagian Kedua*. Bandung, CV. Mandar Maju, hlm 5

(*civil society*) dapat menjadi penggerak dalam pelaksanaannya, sedangkan pemerintah pada posisi ini sebagai pengawas dan pengontrol.

Permasalahan masyarakat di Indonesia terutama masalah ekonomi dan sosial sudah terlalu berat sehingga pemerintah tidak sanggup menanggungnya sendiri. Pemerintah yang menjadi penanggung jawab utama dalam menyejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan tidak akan menanggung beban tersebut sendiri, melainkan membutuhkan partisipasi, salah satunya yang paling potensial adalah dari perusahaan, dan juga dukungan dari masyarakat agar akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai dan sesuai dengan konsep *governance* yang memberikan ruang bagi swasta dan masyarakat madani sebagai bagian yang sangat penting dalam pembangunan untuk dilibatkan. Hal ini mengingat swasta memiliki peran andil dalam kemitraan dengan masyarakat dan pemerintah. Tujuannya untuk menghubungkan kepentingan yang sinergi dan saling mendukung untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.

Sebagian perusahaan di Indonesia yang masih beroperasi, *CSR* awalnya dianggap sebagai kegiatan yang sukarela, padahal setelah adanya kebijakan pemerintah tentang tanggung jawab perusahaan tersebut seharusnya tidak ada lagi yang harus dipertanyakan, tidak ada lagi alasan bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan prinsip *CSR* dalam aktivitas usahanya. Atau dengan kata lain seluruh perusahaan yang aktif wajib menerapkan *CSR*.

Di Kabupaten Pasuruan terdapat banyak sekali perusahaan akan tetapi hanya sebagian saja yang melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Seperti yang dikutip dari tribunews.com yang mengatakan bahwa:

“Di Kabupaten Pasuruan terdapat sekitar 1600 perusahaan baik kecil, menengah, dan besar. Namun, meski sudah diatur dalam undang-undang, belum seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan, melaksanakan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*”.⁹

Oleh sebab itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Pasuruan.

Salah satu perusahaan besar yang berada di Kabupaten Pasuruan adalah PT Cheil Jedang Indonesia yang berada di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. PT Cheil Jedang Indonesia adalah perusahaan yang memproduksi monosodium glutamat (MSG), L-treonin, dan asam nukleat. PT Cheil Jedang beroperasi sebagai anak perusahaan dari CJ Corporation yang berasal dari Korea, PT Cheil Jedang didirikan di Indonesia pada tahun 1996 dan berpusat di Jakarta. Selain berada di Kabupaten Pasuruan, PT Cheil Jedang Indonesia juga mempunyai cabang di Kabupaten Jombang.

Sebagai salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan seperti yang diamanahkan oleh UU No. 40 Tahun 2007 dan Perda Kabupaten Pasuruan No. 31 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), maka dari itu PT Cheil Jedang Indonesia Di Kabupaten Pasuruan melakukan program dan kegiatan CSR dengan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat sekitar. Salah satu

⁹ Bupati Irsyad Yusuf Kaji Ulang Perda CSR. www.surabaya.tribunnews.com. Diakses pada 16 Mei 2017

bantuan yang pernah dilakukan oleh PT. CJI di Kabupaten Pasuruan Pasuruan adalah menyediakan sumber air bersih yang dialirkan ke rumah-rumah warga di Desa Kemantren Kecamatan Rejos Pasuruan.

Pada satu sisi harus diakui suatu perusahaan merupakan salah satu penopang dan penggerak perekonomian nasional. Peranan perusahaan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan bagian dari kontribusi positifnya. Penciptaan lapangan kerja, produk barang serta jasa yang dihasilkan dari usaha perusahaan, dan pembayaran pajak yang memberikan pendapatan bagi negara merupakan kontribusi yang dirasakan besar manfaatnya.

Namun di sisi lain aktivitas perusahaan khususnya di bidang industri yang biasanya menyebabkan terjadinya masalah pada lingkungan, karena sebagian besar industri memiliki limbah industri yang mungkin menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap lingkungan sekitar. Seperti PT. CJI di Kabupaten Pasuruan, terdapat beberapa kasus dimasa lalu terkait limbah industri PT.CJI di Kabupaten Pasuruan tersebut.

Pada tahun 2012 petani tambak dan nelayan berunjuk rasa di PT. CJI di Kabupaten Pasuruan karena diduga limbahnya yang dibuang ke sungai rejos mencemari lingkungan. Seperti yang dikutip dari Sindonews.com:

“Ratusan petani tambak dan nelayan dari sembilan desa kembali berunjuk rasa di PT Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan. Masyarakat menuntut pabrik yang memproduksi penyedap rasa itu tidak membuang limbah cair ke Sungai Rejos. Larangan tersebut menyusul tuduhan warga terhadap dugaan pencemaran lingkungan yang merusak produktivitas tambak dan air laut”.¹⁰

¹⁰ Buang limbah, nelayan demo PT CJI. www.sindonews.com. Diakses pada 6 Mei 2017

Sedangkan juru bicara PT. CJI di Kabupaten Pasuruan Kulup Widyono mengatakan Proses pengelolaan limbah pabriknya sudah sesuai dengan aturan, seluruh limbah cair yang dibuang ke sungai juga sudah memenuhi mutu baku yang diatur pemerintah.¹¹

Terkait masalah limbah tersebut, pada tahun 2013 perjuangan warga sekitar perusahaan membuahkan hasil, PT.CJI sepakat memberikan dana kompensasi sebesar 600 juta per tahun, di mana dana tersebut nantinya akan digunakan untuk perbaikan lingkungan karena sebelumnya warga mengeluh limbah PT.CJI yang mencemari sungai, Kesepakatan tersebut tertuang dalam MOU yang ditandatangani oleh PT. CJI di Kabupaten Pasuruan dan perwakilan warga sekitar dan pemerintah daerah di pendopo Kabupaten Pasuruan.¹²

Setelah 2 tahun berjalan, yaitu pada tahun 2015, dana kompensasi sebesar 600 Juta per tahun yang diberikan oleh PT. CJI dipertanyakan oleh beberapa perwakilan warga, seperti dikutip dari wartabromo:

“Sejumlah perwakilan warga Desa Arjosari Kecamatan Rejos Pasuruan akhirnya mendatangi PT Cheil Jedang Indonesia (CJI) untuk meminta penjelasan terkait kejelasan besaran dana kompensasi yang seharusnya diterima oleh masyarakat, Rabu (21/1/2015) siang”.¹³

Padahal setelah didatangi oleh beberapa perwakilan warga, Humas PT. CJI mengatakan sudah memberikan dana tersebut dan di saksikan oleh beberapa pihak termasuk Tim 10 yang bertugas mengelola dana tersebut. Peristiwa tersebut

¹¹ Protes Pencemaran, Warga Pasuruan Blokade Jalan. www.tempo.co. Diakses pada 6 Mei 2017

¹² PT CJI Rejos Berikan Kompensasi Rp 600 Juta Per Tahun ke Warga. www.news.detik.com. Diakses pada 6 Mei 2017

¹³ Dipertanyakan Warga, PT CJI Akui Telah Serahkan Rp 1,2 M di Kecamatan. www.wartabromo.com. Diakses pada 12 Agustus 2017

menandakan bahwa warga sekitar tidak merasakan manfaat dari dana kompensasi tersebut, dan digunakan untuk apa dana kompensasi tersebut.

Setelah itu Pada tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup (BLH) mengeluarkan surat teguran no.660/1445.1/424.078/2015 yang dikeluarkan pada 30 September 2015 yang lalu, di mana dalam surat tersebut berisikan agar pihak pabrik memperhatikan tindakan serta langkah-langkah yang lebih konkrit sehingga kualitas limbah cair yang dihasilkan lebih maksimal dan bau dapat diturunkan lagi, dikarenakan pengaduan masyarakat sangat tinggi sekali akan bau yang sangat menyengat serta dampaknya sangat berbahaya terhadap kesehatan masyarakat.¹⁴

Oleh sebab itulah peneliti menjadikan PT. CJI di Kabupaten Pasuruan sebagai objek penelitian karena ketertarikan peneliti terhadap kegiatan produksi PT. CJI di Kabupaten Pasuruan yang sampai saat ini masih mengganggu masyarakat sekitar yaitu limbah perusahaan tersebut mengeluarkan bau yang tidak sedap. Hal tersebut sangat bertentangan dengan konsep *CSR* akan dibahas pada bab berikutnya. Keadaan ini juga menimbulkan berbagai tuntutan masyarakat dalam permasalahan lingkungan, kesejahteraan masyarakat sekitar, dan lain-lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan apa yang sudah dijelaskan mengenai latar belakang tersebut, maka muncul suatu permasalahan dalam penelitian ini yang dirumuskan sebagai berikut:

¹⁴ BLH Layangkan Surat Teguran Kepada PT.Cheil Jedang Indonesia. www.tabloidbongkar.com. Diakses pada 6 Mei 2017

1. Bagaimana relasi pemerintah dan *civil society* dalam pelaksanaan *CSR (Corporate Social Responsibility)* PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan *CSR (Corporate Social Responsibility)* PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana relasi pemerintah dan *civil society* dalam pelaksanaan *CSR (Corporate Social Responsibility)* PT. Cheil Jedang Indonesia Di Kabupaten Pasuruan, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan *CSR (Corporate Social Responsibility)* PT. Cheil Jedang Indonesia Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, tambahan referensi serta sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya khususnya tentang bagaimana pelaksanaan *CSR (Corporate Social Responsibility)* PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan dalam perspektif *governance*.
- b) Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang untuk menambah koleksi kepustakaan serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa tentang bagaimana pelaksanaan *CSR (Corporate*

Social Responsibility) PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan dalam perspektif *governance*.

2. Manfaat Praktis

Bagi PT. Cheil Jedang Indonesia Pasuruan untuk bahan evaluasi dan analisis untuk mengetahui tentang bagaimana relasi pemerintah dan *civil society* dalam pelaksanaan *CSR (Corporate Social Responsibility)* PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan *CSR (Corporate Social Responsibility)* PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang bagaimana relasi pemerintah dan *civil society* dalam pelaksanaan *CSR (Corporate Social Responsibility)* PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan dalam dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan *CSR (Corporate Social Responsibility)* PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritik

2.1.1 Governance

Governance dapat diartikan sebagai mekanisme, praktik dan tata cara pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) mengatur sumber daya serta mengatasi masalah-masalah publik.¹ Dalam konsep *governance*, Pemerintah hanya menjadi salah satu dari ketiga aktor, dan pemerintah juga tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Peran pemerintah sebagai penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong dan pengontrol terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas.

Governance menuntut perubahan arti dalam peran suatu negara, dan itu berarti adanya perubahan arti pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga termasuk sektor swasta dan masyarakat madani (*civil society*), antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.² Bisa juga dikatakan bahwa *governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip.

Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsep pemerintahan (*governance*) dengan pola pemerintahan tradisional adalah terletak pada tuntutan

¹ Sumarto Hetifa Sj. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal 1-2

² *Ibid*

peran pemerintah yang dikurangi dan peran masyarakat termasuk swasta dan lembaga swadaya ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya. Dari sinilah muncul pemikiran baru yang mengarah pada perubahan pola penyelenggaraan pemerintahan dari pola pemerintahan tradisional menjadi pola baru yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan sektor swasta dan masyarakat.³

Kualitas *governance* dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen *governance* yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.⁴ *Governance* juga memberikan ruang bagi swasta sebagai bagian yang sangat penting dalam pembangunan untuk terlibat. Hal ini mengingat swasta memiliki peran andil dalam kemitraan dengan masyarakat dan pemerintah. Tujuannya untuk mensinergikan kepentingan dan saling mendukung untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.

Kelembagaan dalam *governance* mempunyai tiga sektor yaitu, negara atau pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berinteraksi dalam menjalankan fungsinya masing-masing.⁵ Negara berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan membantu menyelesaikan permasalahan sosial, dan masyarakat menggerakkan kelompok dalam masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik.

³ Sedarmayanti, 2012. *Good Governance. Kepemerintahan Yang Baik Bagian Kedua*. Bandung, CV. Mandar Maju, hlm 5

⁴ Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal 18

⁵ *Opcit*, hlm. 37

Pada dasarnya unsur pemerintahan (*governance stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi 3 elemen:

- a. Negara/ pemerintah: konsep pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan juga kelembagaan masyarakat
- b. Sektor swasta: mencakup perusahaan yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti industri pengolahan (manufaktur), perdagangan, perbankan, termasuk kegiatan sektor informal
- c. Masyarakat Madani (*civil society*): kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan yang pada dasarnya terletak ditengah-tengah antara pemerintah dan perusahaan, mencakup baik individu maupun kelompok yang berinteraksi secara sosial, ekonomi, dan politik.

Kata *governance* sering dipakai secara luas, sehingga dapat menjadi konsep payung dari sejumlah terminologi dalam kebijakan dan politik, kata ini sering digunakan secara untuk menjelaskan: jaringan kebijakan (*policy networks*), manajemen publik (*public management*), koordinasi antar sektor ekonomi, kemitraan publik-privat, *corporate governance*, dan *good governance* yang sering digunakan menjadi syarat utama yang dikemukakan oleh lembaga-lembaga donor asing.⁶

⁶ H. Sukardi. *Good Governance: Reposisi Administrasi Publik, Lensa Kapital Sosial*. Jurnal Administrasi Publik

Terdapat beberapa istilah yang sering digunakan dalam konsep governance. Berikut adalah 6 istilah dalam konsep governance menurut Rhodes dalam salah satu jurnal administrasi publik,⁷ yaitu:

- a) *Governance as the Minimal State*; ukuran, struktur dan peran pemerintah dirampingkan supaya proses penyelenggaraan pemerintah lebih efektif dan efisien dengan melakukan pengurangan beban anggaran, privatisasi dan memotong jumlah dinas sipil yang dirasa kurang berfungsi.
- b) *Governance as Corporate Governance*; proses penyelenggaraan kegiatan dengan mengambil over / mengimitasi prinsip-prinsip yang ada di sektor privat, keterbukaan informasi, integritas individu, peran yang lebih jelas dan akuntabilitas yang tinggi.
- c) *Governance as The New Public Management*; proses penyelenggaraan pemerintah yang lebih mengedepankan peran pemerintah sebagai layaknya peran manajer pada perusahaan/bisnis.
- d) *Governance as Good Governance*; proses penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, yaitu dalam arti berusaha mencapai kinerja dan juga sekaligus lebih responsive, representatif dan responsible
- e) *Governance as A Socio-Cybernetic System*; proses penyelenggaraan pemerintah yang melibatkan interaksi dan interelasi banyak actor/pelaku

⁷ Islami, Irfan, 2003. *Dasar-dasa Administrasi Publik dan Manajemen Publik*. Malang.

baik dari birokrasi pemerintah maupun non-pemerintah (legislatif, swasta, LSM, akademi pers/media) dan bertanggung jawab secara bersama.

- f) *Governance as Self-Organizing Networks*; proses penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan atas terbentuknya antar-organisasi dan antar-aktor yang kuat dimana semua pihak saling bertukar sumber-sumber baik dana, informasi, maupun keahlian serta akses dan asset lain untuk memaksimalkan kinerja pemerintah.

Dalam konteks reposisi administrasi publik, Frederickson memberikan interpretasi *governance* dalam empat terminologi yaitu: Pertama, *governance* menggambarkan bersatunya beberapa organisasi atau institusi baik dari pemerintah maupun swasta yang dipertautkan secara bersama untuk mengurus kegiatan publik. Mereka dapat bekerja secara bersama sama dalam sebuah hubungan di suatu negara,⁸ *governance* menunjuk jaringan (*networking*) dari sejumlah himpunan yang secara mandiri mempunyai kekuasaan otonom. Atau dalam ungkapan Frederickson adalah perubahan dari sentralisasi organisasi menuju organisasi yang terdesentralisir. Mereka bertemu untuk bermusyawarah, menyatukan kepentingan sehingga dapat dicapai tujuan bersama.⁹

Kedua, *Governance* sebagai tempat berkumpulnya berbagai pluralitas aktor, bahkan disebut sebagai (hiper pluralitas) untuk membangun sebuah hubungan antar pihak yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung yang dapat berupa: partai politik, lembaga pemerintah, kelompok kepentingan termasuk sektor swasta

⁸ *Ibid*, hlm.27

⁹ *Ibid*

dan masyarakat (*civil society*), untuk menyusun pilihan-pilihan kebijakan dan juga mengimplementasikan.¹⁰ Hal penting dalam konteks ini adalah mulai hilangnya fungsi kontrol diantara organisasi, dan menyebarnya berbagai pusat kekuasaan pada berbagai organisasi, dan makin berdayanya pusat-pusat pengambilan keputusan yang semakin mandiri.

Dengan demikian terminologi kedua ini menekankan pada, *governance* dalam konteks pluralitas aktor dalam proses perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan. Beberapa pertanyaan yang penting dalam terminologi ini yaitu: seberapa jauh kebijakan yang dilakukan pemerintah merespon tuntutan masyarakat, seberapa jauh masyarakat dilibatkan dalam proses tersebut, seberapa jauh masyarakat dilibatkan dalam proses implementasi, seberapa jauh masyarakat dapat mengakses informasi menyangkut pelaksanaan kebijakan tersebut, seberapa besar kreativitas masyarakat tersalurkan, seberapa jauh hasil kebijakan tersebut memuaskan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kata kunci dalam terminologi kedua ini adalah pluralitas aktor, kekuasaan yang makin menyebar, perumusan dan implementasi kebijakan bersama.¹¹

Ketiga, *governance* berpautan dengan kecenderungan modern dalam literatur-literatur manajemen publik utamanya spesialisasi dalam rumpun kebijakan publik, dimana relasi multi organisasi antar aktor-aktor kunci yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Kerjasama para aktor yang lebih berwatak politik, kebersamaan, lebih kreatif, tidak mencerminkan watak yang kaku utamanya

¹⁰ *Ibid*, hlm.28

¹¹ *Ibid*

menyangkut: organisasi dan tata aturan.¹² Dalam makna lebih luas *governance* merupakan jaringan (*network*) yaitu kinerja antara organisasi lintas vertikal dan horizontal untuk mencapai tujuan kepublikan. Kata kuncinya yaitu jaringan aktor lintas organisasi secara vertikal dan horisontal.

Keempat, terminologi *governance* dalam konteks administrasi publik banyak kaitannya dengan sistem nilai-nilai kepublikan. *Governance* mencerminkan sesuatu hal yang sangat penting, sesuatu yang lebih positif untuk mencapai tujuan publik. Sementara terminologi pemerintah atau *government* dan birokrasi dianggap mencerminkan sesuatu yang kurang kreatif. *governance* dipandang sebagai sesuatu yang lebih kreatif dan lebih responsif bahkan lebih baik.¹³

Dari keempat terminologi tersebut dapat ditarik pokok pikiran bahwa *governance* dalam konteks administrasi publik adalah proses perumusan dan implementasi untuk mencapai tujuan-tujuan publik yang dilakukan oleh aktor yaitu pluralitas organisasi, dengan sifat yang lebih *luwes* dalam tataran vertikal dan horisontal, disemangati oleh nilai-nilai kepublikan antara lain ke responsif, kreatif. Dilakukan dalam semangat kesetaraan dan *netwoking* yang kuat untuk mencapai tujuan publik yang akuntabel.¹⁴

Sementara itu dari perspektif strukturalis seperti pendapat Lynn, Heinrich dan Hill yang dikutip oleh Frederickson, elemen penting *governance* meliputi aras teori kelembagaan (*institutionalism*) dan teori jaringan (*network theory*). Pertama,

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, hlm 29

¹⁴ *Ibid*

governance berkaitan dengan level kelembagaan. Hal ini meliputi sistem nilai, peraturan-peraturan formal maupun informal dengan tingkat pelebagaan yaitu sejauh mana batas-batasnya disepakati, bagaimana prosedurnya, apa nilai-nilai kolektif yang dianut rezim. Yang termasuk dalam konsepsi ini yaitu hukum administrasi, dan bentuk peraturan legal lainnya, teori-teori yang berkaitan dengan bekerjanya birokrasi dalam skala luas.

Kedua, pada level organisasi, *governance* akan berhubungan dengan biro, departemen, komisi dan agen pemerintah atau juga organisasi yang menjalin hubungan kerja dengan pemerintah. Pada tataran ini agendanya adalah kebebasan dan kemandirian administratif, takaran kerja dalam proses pelayanan publik menjadi isu yang penting. Intinya, pada terminologi kedua ini *governance* ditujukan pada peran menyatukan dan mengaitkan kepentingan publik dalam suatu jaringan (*network*) antar institusi.¹⁵

Ketiga, pada level teknis, bagaimana nilai-nilai dan kepentingan publik sebagaimana telah dikemukakan pada pendekatan pertama dan kedua harus dioperasionalisasikan dalam tindakan yang nyata. Isu-isu tentang profesionalisme, standar kompetensi teknis, akuntabilitas, dan kinerja sangat penting dalam konteks ini. Teori-teori yang relevan untuk tema ini antara lain: ukuran-ukuran efisiensi, teknis manajemen budaya organisasi, kepemimpinan, mekanisme akuntabilitas, dan ukuran. Dengan demikian pada level ini *governance* lebih banyak berurusan dengan implementasi kebijakan publik pada tataran operasional.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hlm. 20

¹⁶ *Ibid*

Interpretasi teori *governance* menurut terminologi diatas merupakan reduksi dari dua pendekatan utama, yaitu teori institusionalisme dan teori jaringan (*network*). *Governance* adalah kumpulan dari berbagai organisasi publik dimana negara hanya menjadi salah satu aktor dari aktor lain yang menjalin sebuah *networking*. Karena *governance* merupakan kumpulan dari sejumlah pluralitas organisasi maka kehadirannya juga dibangun oleh berbagai sistem nilai dan norma yang dibawa dalam suatu organisasi dan juga antar organisasi. Dalam konteks ini maka *governance* sesungguhnya dekat dengan sistem nilai yang tersedia dalam sistem sosial. Administrasi publik dalam konteks ini tidak netral dengan berbagai realitas yang berkembang. Saat ini kita telah memasuki sebuah periode kesadaran yang baru, bahwa ciri utama interaksi peradaban masyarakat modern tidak hanya ditentukan oleh sesuatu yang bersifat publik, formal, dan bercorak legal tetapi lebih dari itu juga ditentukan oleh peran yang sifatnya dapat dinegosiasikan, bersifat labil, kontur yang bersifat privat, yang disebut sebagai nilai-nilai informal.¹⁷

Salah satu turunan dari konsep *governance* adalah Perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menjadi sasaran pokok dari sebuah pemerintahan yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang: professional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN; peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik

¹⁷ *Ibid*, hlm. 31

dan integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.¹⁸

Good Governance di landasi oleh beberapa prinsip yang berfungsi penuh terhadap berjalannya sistem yang diharapkan yaitu:

1. Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses pengelolaan otonomi daerah yang dilakukan pemerintah daerah pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas serta advokasi anggaran. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.¹⁹

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan, Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan disetiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Tujuan partisipasi adalah tuntutan dari masyarakat agar mereka harus diberdayakan, diberikan kesempatan, dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik.²⁰

¹⁸ Mustopadidjaja Ar (2003), *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, hlm. 261.

¹⁹ Mardismo (2009), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi. hlm. 18.

²⁰ Krina (2003), *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas*, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Hlm. 23.

Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Cara untuk mengetahui akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses perencanaan anggaran/ laporan keuangan, adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses sistem dan mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah.

2. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.²¹ Menurut UNDP transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan.²² Transparansi dapat diketahui banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum. Tujuan transparansi adalah menyediakan informasi keuangan dan kegiatan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Bentuk transparansi yaitu²³:

3. Akuntabilitas

²¹ *Ibid*, hlm. 14.

²² *Op. Cit*, hlm. 18.

²³ *Op. Cit*, hlm. 15.

Akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.²⁴ Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.²⁵ Akuntabilitas adalah kewajiban bagi pengelola keuangan daerah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.²⁶ Bentuk akuntabilitas sebagai berikut²⁷:

4. Efektivitas dan Efisiensi

Dalam kondisi *Good governance* Efektivitas dan Efisiensi berarti bahwa output dari seluruh proses dan institusi tepat sasaran atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat disamping efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk melakukannya. Konsep efisiensi dalam konteks *Good Governance* juga mencakup penggunaan sumber daya alam dengan memperhatikan kesinambungan dan perlindungan lingkungan. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau dengan penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.²⁸ Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

²⁴ *Ibid*, hlm. 9.

²⁵ *Op. Cit*, hlm. 18.

²⁶ Tjahjanulin Domai (2002), *Reinventing Keuangan Daerah (Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)*, jurnal Administrasi Negara, hlm. 54.

²⁷ *Op. Cit*, hlm. 11.

²⁸ *Op. Cit*, hlm. 4-5.

5. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule Of Law*)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan hukum. Maka dari itu, dalam proses mewujudkan Good Governance, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan supremasi hukum dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: kepastian hukum, hukum yang responsif, penegakkan hukum yang konsisten dan non diskriminatif, independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan tanpa pandang bulu, termasuk hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

6. Peduli Pada *Stake Holders* / Dunia Usaha

Lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang mempunyai kepentingan. Dalam konteks praktik lapangan di dunia usaha, pihak korporasi/ perusahaan mempunyai tanggung jawab moral untuk mendukung bagaimana *good governance* dapat berjalan dengan baik di masing-masing lembaganya. Pelaksanaan *good governance* secara benar pada dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang memang seharusnya dimiliki oleh setiap perusahaan yang ada di dunia.

7. Berorientasi Pada Konsensus (Consensus)

Bahwa keputusan harus dilakukan melalui proses musyawarah. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua atau sebagian pihak, akan menjadi keputusan yang menjadi milik bersama sehingga akan mempunyai kekuatan memaksa bagi semua sektor yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam

konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Tata cara pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan yang berbeda demi terciptanya suatu konsensus yang menyeluruh dalam hal yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsesus dalam hal kebijakan dan prosedur.

8. Kesenjangan (*Equity*)

Kesenjangan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan meningkatkan kesejahteraan. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan untuk memperoleh informasi yang memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan yang penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Berhubungan dengan hal tersebut pemerintah perlu aktif dalam memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Pemerintah perlu memanfaatkan berbagai jalur komunikasi seperti brosur, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang tata cara mendapatkan informasi.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Visi strategis merupakan pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh

ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Dalam dokumen kebijakan united nation development programme (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu:

1. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
3. Menjamin bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
4. Memperhatikan kepentingan masyarakat yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.²⁹

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Yang artinya, proses pengambilan keputusan dari yang bersifat hirarki dan akan berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder.

²⁹ Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal 3

2.2 Kerangka Konseptual

Dalam hal untuk membantu kelancaran dalam pembahasan penelitian, terlebih dahulu peneliti menjelaskan tentang kerangka konseptual mengenai *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *CSR* adalah suatu komitmen yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab kepada lingkungan sekitar perusahaan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Dalam hal ini yang diperlukan peneliti untuk pembahasan tentang bagaimana konsep *CSR* dalam menyejahterakan *stakeholder*-nya. Supaya dapat memperlancar kejelasan suatu pemikiran peneliti dalam pembahasan selanjutnya.

2.2.1 *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate Social Responsibility (CSR) atau bisa diartikan dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu komitmen yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab kepada lingkungan sekitar perusahaan baik di dalam maupun di luar perusahaan, karena suatu kegiatan produksi biasanya menimbulkan dampak yang negatif kepada lingkungan sekitar atau sebagai timbal balik atas kegiatan produksi yang menguntungkan di suatu perusahaan.

Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 1 butir ke 3 menyebutkan definisi tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai berikut:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik

bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.³⁰

Dari definisi di atas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) dapat dikatakan bahwa definisi tersebut menekankan pada terciptanya pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri maupun bagi masyarakat.

Menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dalam Yusuf Wibisono, menyatakan definisi *CSR*:

“Continuing commitment by business to behave ethically and contributed to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”.³¹

Definisi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) adalah komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan juga menaikkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya maupun komunitas sekitar dan masyarakat luas.

CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah triple bottom lines (3BL). Paradigma 3BL menegaskan bahwa kesuksesan suatu perusahaan tidak diukur oleh aspek keuangan saja, tetapi juga diukur dari aspek lingkungan dan aspek sosial. Paradigma tersebut sudah lama dikenal di dunia bisnis yang dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya. 3BL biasa juga disebut “Triple-P” yaitu aspek ekonomi yang

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1

³¹ Yusuf Wibisono (2007). *Konsep dan aplikasi corporate social responsibility*. Gresik: fascho publishing, hlm. 7

diungkapkan dengan Profit, kemudian aspek lingkungan yang diungkapkan dengan People, dan aspek lingkungan yang diungkapkan dengan Planet.

Kotler dan Lee dalam Ismail Solihin, menyebutkan enam jenis kegiatan CSR³², antara lain:

1) Cause Promotion (Promosi Kegiatan Sosial)

Perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan sosial untuk mendukung kegiatan pengumpulan dana atau perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu.

2) Cause Related Marketing (Pemasaran Terkait Kegiatan Sosial)

Perusahaan menyumbangkan sebagian penghasilan berdasarkan penjualan untuk pelaksanaan kegiatan sosial.

3) Corporate Social Marketing (Pemasaran Masyarakat Perusahaan)

Perusahaan melakukan kampanye untuk merubah pola pikir dan perilaku masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan, menjaga kelestarian lingkungan, dan menyejahterakan masyarakat.

4) Corporate Philanthropy (Kegiatan Filantropis Perusahaan)

Perusahaan memberi subangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan tertentu.

5) Community Volunteering (Pekerja sosial kemasyarakatan secara sukarela)

³² Ismail Solihin (2008). *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba empat, hlm. 131 - 141

Perusahaan mendorong para karyawan dan rekan bisnis seperti pe-waralaba untuk menyisihkan waktunya secara sukarela untuk membantu organisasi-organisasi masyarakat.

6) *Social Responsible Business Practice* (Praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial)

Perusahaan melakukan kegiatan bisnis dan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan menyejahterakan komunitas dan memelihara lingkungan hidup.

Organization for Economic Corporation and Development (OECD) merumuskan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam implementasi CSR yang berisikan kebijakan umum, yaitu:

1. Memberi kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
2. Menghormati hak-hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan tersebut.
3. Mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerja sama yang baik dengan masyarakat lokal.
4. Mendorong pembentukan human capital, khususnya melalui lowongan kerja dan pelatihan bagi karyawan.
5. Menahan diri untuk tidak menerima atau mencari pembebasan yang tidak dibenarkan secara hukum yang terkait dengan lingkungan kesehatan, keselamatan kerja, perpajakan, dan isu lainnya.

6. Memegang teguh prinsip - prinsip *Good Corporate Goverment* (GCG) dan menerapkan praktik - praktik tata kelola perusahaan yang baik.
7. Mengembangkan praktik sistem manajemen yang mengatur perusahaan itu sendiri (*self-regulation*) agar tercipta rasa saling percaya antara perusahaan dan masyarakat setempat.
8. Mendorong kesadaran pekerja yang sejalan dengan kebijakan perusahaan dengan cara memberikan informasi tentang kebijakan tersebut, termasuk program pelatihan karyawan.
9. Menahan diri untuk tidak melakukan tindakan - tindakan diskriminasi.
10. Mengembangkan kemitraan bisnis, termasuk para kontraktor untuk menerapkan aturan perusahaan yang sejalan dengan pedoman perusahaan.
11. Bersikap abstain terhadap semua pihak yang tidak seharusnya dalam kegiatan politik lokal.

Setelah kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) tersebut di implementasikan, ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program *CSR*. Menurut Dwi Kartini ³³, terdapat 8 indikator yang bisa digunakan untuk mengukur implementasi *CSR* yaitu:

1. Leadership
 - a. Program *CSR* dikatakan berhasil jika mendapatkan dukungan dari Staf perusahaan teratas.

³³ Dwi Kartini (2009). *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasinya di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 54-55

b. Terdapat kesadaran oleh pimpinan yang menjadi dasar terhadap pelaksanaan program

2. Proporsi Bantuan

Bagus tidaknya program *CSR* bukan dilihat dari jumlah anggarannya saja, jadi ketika areanya luas maka anggaran yang dikeluarkan perusahaan juga harus lebih besar. Artinya apabila anggaran yang dikeluarkan oleh perusahaan terhitung besar belum tentu program *CSR* tersebut bisa dinilai bagus, sebaliknya jika anggaran yang dikeluarkan perusahaan tersebut kecil belum tentu program *CSR* tersebut bisa dinilai jelek.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

- a) Terdapat laporan tahunan
- b) Mendapatkan mekanisme audit sosial dan finansial, dimana audit sosial tersebut terkait dengan sejauh mana program tersebut sudah dilakukan secara benar dan mendapatkan timbal balik terhadap masyarakat.

4. Cakupan Wilayah

Terdapat identifikasi penerima manfaat program *CSR* berdasarkan skala prioritas yang ditentukan.

5. Perencanaan dan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

- a) Dalam perencanaan perlu adanya jaminan untuk melibatkan multi-stakeholder pada setiap siklus pelaksanaan program

- b) Terdapat kesadaran untuk memperhatikan aspek lokalitas, seperti adanya kontribusi, pemahaman, dan penerimaan terhadap budaya- budaya lokal yang ada.
- c) Terdapat *blue print policy* yang menjadi dasar pelaksanaan suatu program.

6. Perlibatan Stakeholder

Terhadap mekanisme koordinasi reguler dengan *stakeholders*, utamanya masyarakat.

7. Keberlanjutan

- a) Terjadi alih peran dari perusahaan ke masyarakat.
- b) Tumbuhnya rasa memiliki program dan hasil program pada masyarakat, sehingga masyarakat senantiasa ikut serta dalam pemeliharaan program.
- c) Adanya pihak dalam program yang menjamin bahwa tanpa adanya keikutsertaan perusahaan, program tetap bisa dijalankan sampai selesai dengan pihak tersebut.

8. Hasil Nyata

- a) Terdapat dokumentasi hasil yang menunjukkan berkurangnya angka kematian (dalam bidang kesehatan), atau parameter lain yang sesuai dengan bidang dari *CSR* yang dipilih perusahaan.
- b) Terjadi perubahan pada pola pikir masyarakat.
- c) Memberikan dampak ekonomi yang dinamis kepada masyarakat.
- d) Terciptanya penguatan komunitas (*community empowerment*)

2.2.2 Kebijakan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pemerintah mempunyai beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau *CSR (Corporate Social Responsibility)*, antara lain:

1. Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang ini diundangkan secara resmi pada tanggal 16 Agustus 2007. Dalam bab ketentuan umum, pasal 1 menjelaskan mengenai pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen Perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, warga setempat, maupun masyarakat pada umumnya.³⁴ Lebih dalam membahas tentang teknis pelaksanaan TJSL ada pada bab Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Pasal 74 ayat (1): “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.³⁵

2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi tanggung jawab perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 3 yang menyatakan:

³⁴ Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³⁵ *Ibid*, Pasal 74

Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.³⁶

Kewajiban tersebut juga harus dituangkan dalam rencana kerja tahunan perusahaan seperti pada pasal 4 ayat 1 yang menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perusahaan yang dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan.³⁷

Peraturan Pemerintah tersebut juga menjelaskan bahwa Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenakan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajibannya, akan tetapi akan diberi penghargaan apabila telah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti yang tertera pada pasal 7: “Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.³⁸ Dan pasal 8 ayat (2): “Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang”.³⁹

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

³⁶ Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Pasal 3

³⁷ *Ibid*, Pasal 4

³⁸ *Ibid*, Pasal 7

³⁹ *Ibid*, Pasal 8

Peraturan daerah tersebut menjelaskan asas, prinsip dan ruang lingkup pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, seperti pada pasal 4

Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas: a).kepastian hukum; b).kepentingan umum; c).kebersamaan; d).partisipatif dan aspiratif; e).keterbukaan; f).berkelanjutan; g).berwawasan lingkungan; h)kemandirian; dan i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁴⁰

Kemudian Pasal 5 ayat (1):

Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip: a). kesadaran umum; b). kepedulian; c). keterpaduan; d). kepatuhan hukum dan etika bisnis; e. kemandirian; f. sensitivitas; g). keberpihakan; h). kemitraan; i). inisiasi; j). matualistis, dan non diskriminasi; dan k). koordinatif.⁴¹

Dan Pasal 5 ayat (2):

Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada:

a). manajemen yang sehat; b). profesional; c). transparan; d). akuntabilitas; e). kreatif dan inovatif; f). terukur; g). program perbaikan berkelanjutan; h). keadilan yang bijak; dan i). kebijakan yang adil.⁴²

Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan peningkatan fungsi lingkungan hidup yang memacu pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan yang sejalan dengan program-program pemerintah daerah.⁴³ Ruang lingkup tersebut berlaku untuk kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak dari kegiatan operasional perusahaan.⁴⁴

⁴⁰ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pasal 4

⁴¹ *Ibid*, Pasal 5

⁴² *Ibid*,

⁴³ *Ibid*, Pasal 6

⁴⁴ *Ibid*

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 31 Tahun 2012 tentang tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Isi dari peraturan daerah Kabupaten Pasuruan tersebut tidak jauh berbeda dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu terdapat penjelasan mengenai asas, prinsip dan ruang lingkup pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu terdapat juga jenis program yang dapat lakukan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, seperti pada pasal 12 yang menyebutkan bahwa: “Program TSP meliputi: a. bina lingkungan dan sosial; b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; c. program langsung pada masyarakat”.⁴⁵ Penjelasan mengenai program- program yang dimaksud tersebut juga dijelaskan pada Perda tersebut pada pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15. Selain itu dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa perusahaan dapat membuat forum pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) dengan perusahaan lain agar program TSP terencana secara terpadu, harmonis, dan efisien.⁴⁶ Selain itu pada pasal 18 disebutkan bahwa : “Perusahaan pelaksana program TSP wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan evaluasi TSP kepada Sekretariat bersama melalui forum pelaksana TSP”.

Dari beberapa kebijakan pemerintah tentang tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yang sudah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah tentang tanggung jawab sosial perusahaan mengatur beberapa hal, antara lain:

⁴⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 31 Tahun 2012, Pasal 12

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 16

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya wajib melakukan tanggung jawab sosial perusahaan/ *CSR*
2. Konsep- konsep yang meliputi: asas, prinsip, dan pedoman dalam pelaksanaan *CSR*.
3. Penghargaan dan sanksi yang akan didapat apabila perusahaan telah menjalankan atau tidak menjalankan *CSR*.
4. Bentuk- bentuk *CSR* yang dapat berupa program langsung kepada masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana, kemitraan usaha, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bahan pembanding dengan penelitian yang saat ini, berkaitan dengan penelitian ini yang berjudul “Pelaksanaan *CSR (corporate social responsibility)* PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan dalam perspektif governance” sehingga untuk menunjang penelitian ini maka peneliti melakukan tinjauan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh:

1. Jati Seputro dengan judul: Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif pemerintahan yang baik: Studi kasus PT. Tirta Investama di dusun jatianom, desa karang jati, Kecamatan pandaan, Kabupaten Pasuruan.. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Tirta Investama di Dusun Jatianom, Kec Pandaan Kab Pasuruan dan untuk mengetahui kualitas tanggung jawab sosial

perusahaan PT Tirta Investama di Dusun Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana penulis meneliti data primer dan data sekunder di lapangan. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purpose sampling.

2. Rara Saraswati dengan judul: Pengaruh *corporate governance* pada hubungan *Corporate Social Responsibility* dan nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan nilai perusahaan dan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* pada hubungan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan nilai perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Statistik deskriptif. Variabel yang diteliti menggunakan analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility*, *corporate governance* dan nilai perusahaan.

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul	Fokus	Jenis Penelitian
Deby Wahyuningtyas. Pengaruh praktik penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI	Bagaimana pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2012-2015	Kualitatif
Ihda Amanati Munawwaroh. Implementasi Corporate Social Responsibility terkait prinsip Good Corporate Governance pada BUMN program kemitraan (studi pada PT. BRI (persero). Tbk, cabang wonosari, Yogyakarta)	Bagaimana pelaksanaan program kemitraan sebagai <i>Corporate Social Responsibility</i> dari PT.BRI (persero) yang terkait <i>Good Corporate Governance</i>	Kualitatif
Jati Seputro. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif pemerintahan yang baik: Studi kasus PT. Tirta Investama di dusun jatianom, desa karang jati, Kecamatan pandaan, Kabupaten Pasuruan.	Sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan PT Tirta Investama di Dusun Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dilaksanakan?	Kualitatif
Rara Saraswati. Pengaruh corporate governance pada hubungan Corporate Social Responsibility dan nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.	Apa pengaruh corporate governance pada hubungan Corporate Social Responsibility dan nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.	Kualitatif

Sumber: Diolah oleh penulis, 2018

Dari tinjauan kedua penelitian terdahulu yang tercantum di atas, ada perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini, perbedaan dengan penelitian pertama oleh Jati Seputro yang berjudul Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif pemerintahan yang baik: Studi

kasus PT. Tirta Investama di dusun Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Penelitian tersebut berfokus pada Sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan PT Tirta Investama di Dusun Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dilaksanakan, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada Bagaimana Relasi pemerintah dan *civil society* dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan.

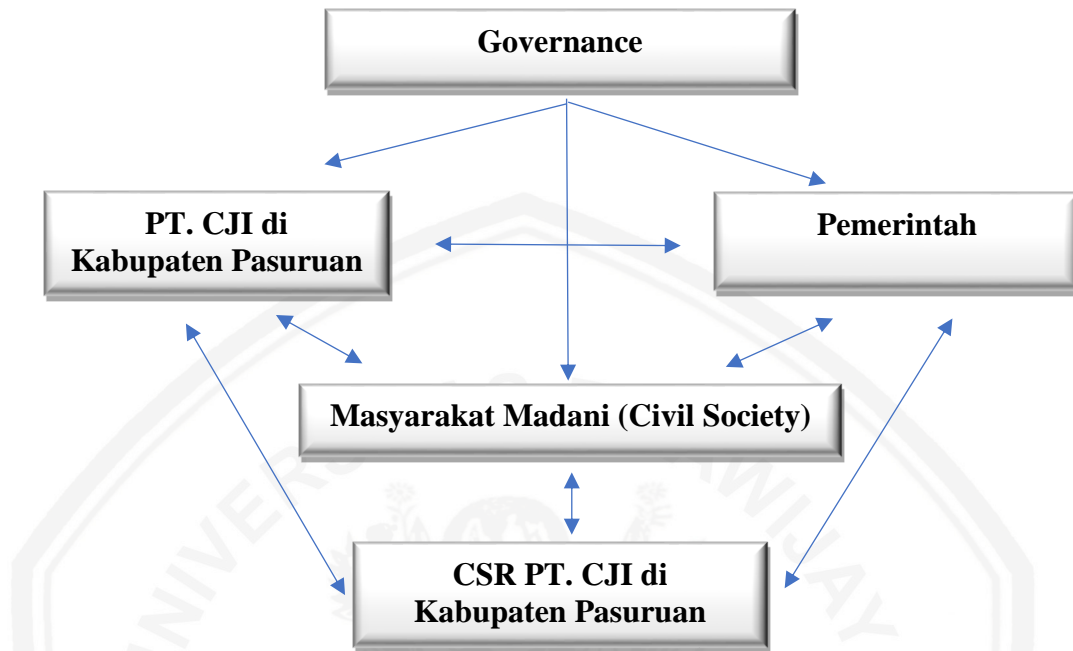
Perbedaan dengan penelitian kedua yang dilakukan oleh Rara Saraswati. Yang berjudul Pengaruh corporate governance pada hubungan Corporate Social Responsibility dan nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, dimana penelitian tersebut lebih berfokus untuk mengetahui Apa pengaruh corporate governance pada hubungan Corporate Social Responsibility dan nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana relasi pemerintah dan *civil society* dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan. Kedua penelitian di atas juga dilakukan di perusahaan dan lokasi yang berbeda, penelitian pertama oleh Jati Seputro dilakukan di PT. Tirta Investama di dusun jatianom, desa karang jati, Kecamatan pandaan, Kabupaten Pasuruan., penelitian yang kedua oleh Rara Saraswati dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2011, sedangkan penelitian ini dilakukan di PT. CJI di Kabupaten Pasuruan tahun 2016-2018.

2.4 Alur Pemikiran

Penelitian merupakan suatu proses dimana harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan sebagai pedoman untuk melakukan penelitian. Penelitian tidak dapat dilakukan hanya dengan bermodal rasa ingin tahu saja, tetapi penelitian juga harus mengidentifikasi masalah kemudian menuju ke tahap selanjutnya. Penelitian kualitatif bersifat berkembang selama proses penelitian itu berlangsung.

Penelitian ini berawal dari banyaknya perusahaan di Kabupaten Pasuruan yaitu terdapat lebih dari 1600 perusahaan, akan tetapi belum semuanya melakukan tanggung jawab sosial (*CSR*), kemudian muncul beberapa kasus salah satunya adalah yang terjadi di Kecamatan Rejos Kabupaten Pasuruan yaitu demo ratusan petani tambak terhadap PT. CJI di Kabupaten Pasuruan terkait dengan limbah industri. Sebenarnya PT. CJI di Kabupaten Pasuruan sudah mempunyai atau melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*), akan tetapi kasus demo petani tambak terkait limbah industri tersebut sangat bertentangan dengan konsep *CSR* yang bertemakan pemberdayaan sosial dan pelestarian lingkungan. Sedangkan *CSR* itu sendiri berkaitan dengan pemerintah dan masyarakat madani (*civil society*) sebagai relasi dalam *governance*, maka dari itu peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana relasi pemerintah dan *civil society* dalam pelaksanaan *CSR* (Corporate Social Responsibility) PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan, dan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan *CSR* oleh PT. CJI di Kabupaten Pasuruan dengan apa yang senyatanya terjadi di lapangan.

Gambar 2.4 Alur Pemikiran



Sumber: Diolah oleh penulis, 2018

Dengan memperhatikan skema di atas dapat dilihat bahwa berawal dari konsep *governance* yang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan masyarakat madani, dan ketiga sektor tersebut saling berhubungan satu sama lain dan juga berhubungan dengan *CSR* yang dilakukan oleh PT. CJI di Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana relasi pemerintah dan *civil society* dalam pelaksanaan *CSR* (Corporate Social Responsibility) PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan. dan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan *CSR* oleh PT. CJI di Kabupaten Pasuruan

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan untuk mencari fakta yang sebenarnya untuk memenuhi keinginan manusia atas sesuatu yang dilihat, didengar, dengan menggunakan ukuran kebenaran tertentu. Kebenaran yang dicari oleh peneliti tergantung pada pemahaman dan pengetahuannya, suatu kebenaran akan berbeda satu sama lain sesuai dengan pengalaman dan paradigma yang dianutnya.¹ Dalam sebuah penelitian biasanya diperlukan sebuah metode, metode adalah sebuah cara atau teknik untuk menemukan hasil yang diinginkan. Perlu pemilihan metode yang tepat di sebuah penelitian, agar penelitian tersebut tidak salah arah atau melebar ke permasalahan lain dan sesuai dengan tujuan penelitian, selain itu metode juga harus disesuaikan dengan pokok permasalahannya. Uber Silalahi mengatakan bahwa metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis untuk menyelidiki suatu masalah dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut.²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut juga metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi secara nyata atau alamiah. Moleong

¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, hlm. 20

² Uber Silalahi (2009). *Metode Penelitian Sosial..* Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 12-13.

menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang terjadi secara alamiah untuk mencari dan menemukan pemahaman terhadap fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.³ Suatu penelitian kualitatif dilakukan dan dikembangkan dari suatu fenomena sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Melakukan dan mengembangkan penelitian kualitatif adalah mengembangkan pertanyaan dasar tentang apa dan bagaimana kejadian itu terjadi, aktor yang terlibat, dan kapan kejadian tersebut terjadi. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mendalami fenomena yang bersifat deskriptif seperti proses, langkah kerja, resep, atau formula yang sulit dilakukan jika menggunakan penelitian kuantitatif.⁴

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat di mana peneliti akan melakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data dan informan yang bisa mendukung terselesainya sebuah penelitian. Pada lokasi penelitian ini harus disesuaikan dengan pembahasan dan persoalan yang akan diteliti sehingga hasil yang akan diperoleh dapat tercapai secara maksimal. Peneliti menetapkan lokasi penelitian di PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan. Peneliti menetapkan lokasi penelitian di PT. CJI di Kabupaten Pasuruan karena ingin mengkaji secara mendalam bagaimana relasi pemerintah dan *civil society* dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Cheil Jedang Indonesia di

³ Lexy J. Moleong (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.5

⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, hlm. 22-23.

Kabupaten Pasuruan dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan CSR PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan.

3.3 Fokus Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu fokus penelitian agar tidak melebar dari fokus penelitian yang sudah ditentukan, oleh karena itu fokus penelitian merupakan pedoman dari suatu penelitian. Moleong mengatakan bahwa ada dua maksud yang bisa dicapai dalam dengan memanfaatkan fokus penelitian, yaitu: 1). penetapan fokus digunakan untuk membatasi studi sehingga dapat bermanfaat bagi jalannya penelitian. 2). penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk-keluar yaitu suatu informasi yang baru di lapangan sehingga dapat memudahkan dalam pengambilan data serta pengolahan data hingga menjadi suatu kesimpulan.⁵

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana relasi tiga sektor dalam *governance* dalam pelaksanaan CSR PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan tahun 2016 -2018 agar tidak melebar. Peneliti memberikan gambaran kondisi yang sebenarnya yang terjadi di lapangan sehingga dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan CSR PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan dalam perspektif *governance*, relasi pemerintah dan *civil society* yang dimaksud yaitu Pemerintah Desa setempat, mulai dari Kepala Desa sampai Kecamatan, masyarakat madani (*civil society*) yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan CSR PT. CJI di Kabupaten Pasuruan, dan PT. CJI di

⁵ Lexy J. Moleong (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.5

Kabupaten Pasuruan itu sendiri, yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang saling berhubungan, dan juga faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan CSR PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan.

3.4 Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu faktor yang menunjang terselesainya penelitian ini. Data-data yang diperoleh dapat memberikan dukungan atas analisis-analisis yang akan dilakukan terhadap objek atau sasaran penelitian. Adapun sumber data tersebut berupa informasi dan didukung dengan dokumen yang berupa data tertulis. Menurut Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁶ Sedangkan menurut Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh.⁷ Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer, yaitu sejumlah data atau keterangan yang secara langsung diperoleh melalui penelitian di lapangan, meliputi keterangan dari orang-orang yang diteliti yang berhubungan dengan objek penelitian. Yang disebut responden. Data primer berupa data kualitatif dan kuantitatif. Adapun informan dalam penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik sampling yang umum digunakan dalam penelitian

⁶ Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 157.

⁷ Suharsimi Arikunto (1996), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 114.

kualitatif.⁸ Dalam *purposive sampling* peneliti memilih lokasi penelitian dan subjek penelitian dengan tujuan untuk mempelajari dan lebih mendalami permasalahan pokok yang akan diteliti. Peneliti menentukan informan sebagai subyek untuk memperoleh data, yaitu:

1. Humas PT. CJI di Kabupaten Pasuruan yang berhubungan langsung dengan proses pelaksanaan program dan kegiatan CSR.
2. Kepala Desa setempat di sekitar lokasi perusahaan, yaitu kepala Desa Kemantren Rejo, Kecamatan Rejosjo Kabupaten Pasuruan
3. Masyarakat di Desa Kemantren, Kecamatan Rejosjo Kabupaten Pasuruan yang menerima program dan kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT. CJI di Kabupaten Pasuruan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui bukti-bukti berupa catatan-catatan peneliti, laporan historis berupa dokumen atau arsip-arsip dan tabel dari pihak terkait guna lebih memahami persoalan yang akan diteliti dan lebih memperjelas permasalahan teknis di lapangan dengan cara mengamati kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar PT. CJI di Kabupaten Pasuruan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data tidak lain adalah proses pengadaan data untuk

⁸ *Ibid.*, hlm. 114.

keperluan penelitian. Peneliti tidak akan bisa menghasilkan suatu temuan jika tidak memperoleh dan menggunakan data. Pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data berhubungan dengan masalah penelitian, masalah mempengaruhi penentuan metode pengumpulan data.⁹ Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang sering kali digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu melakukan komunikasi dengan seseorang guna mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui informasi yang diketahui oleh informan. Wawancara pada dasarnya merupakan usaha menggali informasi yang lebih dalam dari sebuah sumber yang biasanya berupa pendapat maupun pengalaman.¹⁰

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, peneliti melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan yaitu:

1. Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Rejosso Kabupaten Pasuruan yang menerima program dan kegiatan CSR dari PT. CJI. Wawancara dengan warga sekitar bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan CSR PT. CJI di Kabupaten Pasuruan.

⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, hlm.103

¹⁰ *Ibid*, hlm. 129

2. Wawancara dengan Kepala Desa Kemantren Rejo yang berada di Kecamatan Rejos Kabupaten Pasuruan. Wawancara dengan Kepala Desa di Kecamatan Rejos Pasuruan sebagai pihak dari pemerintah di tingkat Desa
3. Wawancara dengan Staf Humas PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan. Wawancara dengan Staf Humas PT. CJI di Kabupaten Pasuruan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *CSR* yang dilakukan PT. CJI di Kabupaten Pasuruan.

2. Dokumentasi

Dokumen adalah sumber informasi yang bukan manusia, biasanya berupa catatan, surat, laporan, foto, gambar dll, dokumen juga bisa dikatakan sebagai catatan kejadian yang telah lampau. Dokumen biasanya digunakan sebagai bukti dalam suatu penelitian dan sebagai pendukung sebuah kebenaran.¹¹

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis adalah suatu usaha untuk menguraikan suatu asalah menjadi bagian-bagian tertentu sehingga susunannya tampak dengan jelas agar lebih mudah dimengerti duduk permasalahannya.¹² Proses analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan pada waktu sebelum memasuki lapangan, ketika di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Aktivitas analisis data menurut Miles dan Huberman terdiri

¹¹ *Ibid*, hlm. 147

¹² *Ibid*, hlm. 200

atas: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclusion drawing/ verification* yang dilakukan dan berlangsung secara terus menerus.¹³

1) Reduksi data (*data reduction*)

Ketika melakukan penelitian, maka peneliti akan mendapatkan data yang banyak dan beragam, oleh sebab itu perlu dilakukan analisis data yaitu reduksi data (*data reduction*). Data yang diperoleh kemudian dirangkum dan difokuskan pada hal yang penting berdasarkan konsep dan tema agar dapat lebih tajam dalam melakukan pengamatan, dan mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan yang sudah diperoleh.¹⁴

2). Penyajian data (*data display*)

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menyajikan data (*data display*). Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam tabel dan grafik, selain itu penyajian data juga bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dll. Tujuan dari penyajian data adalah untuk memudahkan dan lebih memahami apa yang sedang terjadi di dalam suatu penelitian dan juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami.

3). Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verifications*)

Langkah terakhir analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verifications*). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin bisa menjawab permasalahan dalam suatu penelitian dan mungkin juga tidak bisa karena rumusan masalah dalam sebuah penelitian kualitatif

¹³ *Ibid*, hlm. 218

¹⁴ *Ibid*, hlm. 219

bersifat sementara dan bisa berkembang. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum ada sebelumnya, kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya masih belum jelas, dan dapat berupa hipotesis atau teori.¹⁵



¹⁵ *Ibid*, hlm. 220

BAB 4

GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan

PT. Cheil Jedang Indonesia terletak di Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 1 juta jiwa. PT. Cheil Jedang Indonesia Pasuruan memiliki staf Humas yang berjumlah 5 Orang yang bertugas untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Humas PT. CJI tersebut memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun, tetapi waktu tersebut tidak sepenuhnya dalam bidang kehumasan, akan tetapi terhitung sejak bekerja di PT. CJI, yang mayoritas pada posisi sebelumnya bekerja di bagian produksi.¹

Terdapat beberapa Desa yang berlokasi di sekitar perusahaan PT. Cheil Jedang Indonesia Pasuruan yaitu: Di sebelah Timur terdapat Desa Kemantren, Kecamatan Rejoso, kemudian di sebelah Selatan ada Desa Toyaning, Kecamatan Rejoso, sebelah Barat ada Dusun Sarirejo, Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso

PT. CJI mempunyai visi dan misi perusahaan, yaitu:

Visi : Memimpin dalam bisnis bio di mancanegara (World Leader in Biobisnis)

Misi:

1. Memperkenalkan aplikasi standard (Introduce apply global standard)
2. Kepuasan Konsumen (Clustomer Satisfaction)

¹ Wawancara ke-2 dengan Mashudi Junus selaku Humas PT.CJI pada 4 Oktober 2017.

3. Meningkatkan kemampuan organisasi dan karyawan (Increase ability organization and employee)

Hasil Produksi PT. CJI di Kabupaten Pasuruan.²

PT. CJI telah menghasilkan dan memproduksi berbagai produk antara lain:

1. *Monosodium Glutamat*

MSG merupakan bahan penyedap rasa yang dipasarkan dengan nama Mi-Pung dengan kontribusi pemasaran 85% ekspor dan 15% dipasarkan dalam Negeri. Teknologi yang dipasarkan adalah teknologi fermentasi bahan baku yang digunakan adalah tetes tebu dan tepung tapioka, pengiriman tetes tebu telah diatur oleh PTP, dalam hal ini PTP telah menentukan perusahaan gula mana yang mengirimkan tetes tebu. Untuk tepung tapioka diambil dari pasaran lokal yaitu dari Kalimantan dan Sumatra.

2. *L-lysyne*

L-lysyne Merupakan produk utama dari PT. CJI, Nama kimia dari *L-lysyne* adalah *L-lysyne Mono Hidrokolit*. *L-lysyne* merupakan bahan tambahan makanan ternak. Teknologi yang digunakan adalah teknologi fermentasi

3. Pupuk Cair Bagi Tani

Pupuk cair bagi tani merupakan hasil samping PT. CJI yang berasal dari limbah produk *L-lysyne* dan MSG. Dari limbah tersebut ditambahkan beberapa bahan penunjang nutrisi bagi tumbuhan sehingga terbentuk pupuk cair.

4. *Super Feed*

² PT. Cheil Jedang Indonesia Pasuruan

Super feed merupakan produk terbaru dari PT. CJI yang merupakan makanan ternak. Teknologi yang digunakan merupakan pencampuran dari bahan: katul, jagung, gandum, tepung ikan, tepung daging, dan tulang, bungkil kedelai, dan biji kapuk. Pabrik ini baru beroperasi pada 20 Maret 1996 dan pada tanggal 29 Maret 1996 telah melakukan produksi awal.

Kegiatan Usaha PT. Cheil Jedang Indonesia.³

PT. CJI mempunyai beberapa produk yang dijual, untuk memenuhi pasar luar maupun dalam negeri. Produk P T Cheil Jedang Indonesia adalah MSG, *L-Lysine HOI*, *Threonine*, pupuk cair, dan pupuk Zeta. MSG merupakan produk awal yang dipasarkan pada saat berdirinya perusahaan yang berkapasitas produksi 45 ton/ hari. Pangsa pasar luar negeri sebesar 85 % dan sisanya untuk dijual di dalam negeri. Pasar luar negeri meliputi negara Jepang, Thailand, Singapura, Amerika Serikat, dan negara di kawasan Timur Tengah.

L-Lysine HCI adalah produk unggulan PT. Cheil Jedang Indonesia yang digunakan sebagai zat aditif pakan ternak, pertama kali diproduksi pada tahun 1991 dengan kapasitas 25.000 ton/ tahun. Pada tahun 1998 produksi ditingkatkan hingga mencapai 85.000 ton/ tahun dengan pangsa pasar 85 % untuk luar negeri.

L-Threonine adalah produk ketiga yang dihasilkan, dan dewasa ini masih terus berusaha untuk dikembangkan karena peluangnya masih sangat besar, hal ini dilihat dari perusahaan yang memproduksi senyawa ini yang hanya ada 2 di dunia dan PT. Cheil Jedang Indonesia adalah salah satunya. Kapasitas produksi saat ini

³ PT. Cheil Jedang Indonesia Pasuruan

berkisar 25 ton/hari dan akan segera meningkat dengan selesainya pabrik yang sedang dibangun.

Pakan ternak *Super Feed* pertama kali beroperasi tahun 1996 dengan kapasitas 150.000 ton / tahun. Produk tersebut digunakan untuk keperluan anak perusahaan PT. CJI yang bergerak di bidang *breeding* ayam potong dan petelur yang nantinya akan dipasarkan di dalam negeri.

4.1.1 Program dan Kegiatan CSR PT. CJI di Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2018.

PT. CJI mempunyai beberapa program dan kegiatan CSR yang diberikan kepada masyarakat, antara lain:

1. PT. CJI di Kabupaten Pasuruan memberikan beasiswa pendidikan dan santunan kepada ratusan pelajar warga sekitar wilayah Kecamatan Rejoso Pada tanggal 23 Mei 2017. Beasiswa untuk pengembangan pendidikan tersebut sedikitnya diberikan kepada 331 siswa yang berada di sekitar lokasi pabrik, mulai dari tingkatan SD hingga SLTA.⁴ Kegiatan pemberian beasiswa dan santunan tersebut dilakukan di aula lokasi pabrik, dihadiri langsung oleh *Vice President* PT. CJI di Kabupaten Pasuruan, Direktur Administrasi PT. CJI, dan sejumlah Kepala Desa wilayah Kecamatan Rejoso. Hal ini dikatakan sebagai salah satu upaya untuk terus menjaga

⁴ Wartabromo (2017). *Buktikan Peduli dan Tidak Berjarak, PT. CJI Beri Beasiswa Kepada Ratusan Pelajar*. www.wartabromo.com. Diakses pada 9 Agustus 2017

kepedulian PT. CJI terhadap tumbuh kembang maupun pendidikan anak-anak warga sekitar.

2. PT. CJI mempunyai program *CSR* dalam bentuk binaan yang disebutkan di antaranya adalah dibangunnya sekolah sepak bola (SSB), pencak silat hingga kegiatan positif lainnya seperti Qira'at yang masih aktif sampai saat ini. Beberapa anak-anak yang terkumpul dalam binaan PT. CJI di Kabupaten Pasuruan ini telah menunjukkan prestasi yang patut dibanggakan.⁵
3. Pada Tahun 2016 lalu, PT. CJI di Kabupaten Pasuruan melakukan normalisasi Sungai Rejoso Setiap musim hujan. Normalisasi Sungai Rejoso ini merupakan program berkelanjutan sejak Tahun 2004. Kegiatan normalisasi Sungai Rejoso melibatkan dan bekerja sama dengan pihak Pemerintah Desa, dan dengan pemberitahuan kepada Bupati, Dinas Pengairan, dan Kecamatan Rejoso. Sedangkan untuk tenaga kerja, PT. CJI lebih memilih menggunakan tenaga padat karya dari masyarakat sekitar dari pada menggunakan alat berat. Itu dilakukan untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada warga sekitar, dalam kegiatan ini PT Cheil Jedang Indonesia, menyediakan dana sebesar Rp 120 juta.⁶

⁵ *Ibid*

⁶ Wartabromo (2016). *Antisipasi Banjir, PT Cheil Jedang Indonesia Normalisasi Sungai Rejoso*. www.wartabromo.com. Diakses pada 9 Agustus 2017

4. PT. CJI di Kabupaten Pasuruan menggalakkan kegiatan sosial untuk berbagi dengan warga sekitar terutama pondok pesantren kaum dhuafa dan yatim piatu di Pasuruan di Tahun 2017. PT. CJI melakukan kegiatan *road show* kunjungan ke sejumlah pondok pesantren dan yayasan yatim piatu di berbagai kecamatan antara lain Ponpes Al Istiqomah Desa Toyaning, Ponpes Al Hidayah (Metal) Rejoso Lor, Darul Muttaqin Kecamatan Kraton Pasuruan, Miftakhul Ulum Tampung Lekok dan Pondok Pesantren Darul Ulum Sumur Waru, Nguling. Bantuan yang diberikan berupa makanan dan keperluan ibadah seperti sarung dan mukena.⁷
5. PT. CJI di Kabupaten Pasuruan membangun instalasi pompa air di Dusun Sarirejo, Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso di tahun 2017, untuk menjamin warga sekitar tetap mendapatkan air bersih. Instalasi pompa air yang bernilai lebih dari Rp 500 juta tersebut, untuk mencukupi kebutuhan air bersih bagi warga Dusun Sarirejo, yang memiliki populasi kurang lebih 1.100 jiwa. Pompa air tersebut didirikan di lahan milik warga yang telah dibeli oleh PT. CJI, yang luasnya 70 meter persegi, terdapat pula tandon dan pompa pendorong agar dapat mengalir ke rumah-rumah penduduk secara penuh. Sedangkan, biaya perawatan setiap bulannya akan ditanggung oleh PT. CJI.⁸

⁷ Wartabromo (2017). *Jelang Hari Raya, PT. CJI Rejoso Sebar Bantuan Sosial ke Ponpes dan Yayasan*. www.wartabromo.com. Diakses pada 9 Agustus 2017

⁸ Wartabromo (2017). *Buktikan Komitmen, PT. CJI Bangun Pompa Air Bersih Ke Warga Arjosari*. www.wartabromo.com. Diakses pada 9 Agustus 2017

6. PT. CJI bekerja sama dengan Forum silaturahmi antar TPQ (Fushilat) di Kompleks Masjid perusahaan mengadakan kegiatan perlombaan bertema Festival Anak Santri Indonesia, kegiatan ini diikuti sebanyak 525 anak – anak santri dari berbagai TPQ Se-Kecamatan Rejos Kabupaten Pasuruan Pada Tahun 2017. Kegiatan yang rutin digelar oleh pihak PT. CJI di Kabupaten Pasuruan setiap tahun tersebut bertujuan untuk mencetak generasi-generasi qur’ani sejak dini melalui uji kemampuan dalam kemasan perlombaan seperti lomba Tartil Quran, lomba nasyid, lomba da’i cilik, lomba adzan dan Iqomah serta Cerdas Cermat Al – Qur’an.⁹
7. PT. CJI di Kabupaten Pasuruan menyerahkan 100 hewan kurban kepada masyarakat sekitar perusahaan Tahun 2017 yang lalu. Pembagian ini dikatakan sebagai bentuk kepedulian menyambut hari raya Idul Adha. 100 hewan kurban tersebut terbagi dari 97 ekor kambing dan 3 ekor sapi, kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang tidak pernah ditinggalkan.¹⁰
8. PT Cheil Jedang Indonesia bekerja sama dengan warga dan kelompok tani kembali melakukan penanaman 4000 pohon di Sumber Mata Air Mbah Main Dusun Siring Desa Kemiri Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan, Rabu 12 April 2017. Kegiatan penanaman 4000 pohon tersebut dihadiri langsung oleh masyarakat kelompok tani Sidomuncul II Dusun Siring Desa

⁹ Wartabromo (2017). *Wujudkan Generasi Qur’ani, PT CJI dan Fushilat Gelar Festival Anak Santri Indonesia*. www.wartabromo.com. Diakses pada 9 Agustus 2017

¹⁰ Wartabromo (2017). *Mantapkan Kepedulian dan Empati, PT CJI Bagikan 100 Hewan Kurban ke Warga Sekitar*. www.wartabromo.com. Diakses pada 9 Agustus 2017

Kemiri Kecamatan Puspo, perwakilan DLH Kabupaten Pasuruan, serta Kepala Desa Kemiri Kecamatan Puspo.¹¹

9. PT. CJI di Kabupaten Pasuruan memberikan bantuan 4000 bibit tanaman produktif kepada masyarakat Desa Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang yang difasilitasi UPT Pengelolaan Hutan Wilayah V Malang. Bantuan tersebut melalui Kelompok Tani Mekar Sari yang ada di desa tersebut.¹²
10. PT. Cheil Jedang Indonesia (PT CJI) Pasuruan, memberikan santunan dan beasiswa kepada 354 pelajar SD, SMP dan SMA pada Tahun 2018 ini. Bantuan dalam rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ini diberikan kepada pelajar di sekitar wilayah perusahaan. PT. CJI melalui Humas, Mashudi Junus menjelaskan bantuan pendidikan ini merupakan bagian kerja sama dengan Dinas Pendidikan di Kecamatan Rejoso. Kerja sama ini ditegaskan sebagai salah satu upaya pererat hubungan dan komunikasi dengan instansi pemerintah, selain dengan warga.¹³
11. Sebagai bentuk rasa simpati dan kepedulian terhadap para korban banjir terutama di wilayah Kecamatan Rejoso, Grati dan sekitarnya di Tahun 2017, sejumlah perusahaan di wilayah sekitar juga ikut menyalurkan bantuannya kepada para korban banjir tersebut, salah satunya yaitu PT. Cheil Jedang

¹¹ Wartabromo (2017). *Jaga Konservasi Alam, PT CJI Tanam 4 Ribu Pohon di Sumber Mata Air Mbah Main Puspo*. www.wartabromo.com. Diakses pada 9 Agustus 2017.

¹²Wartabromo (2017). PT. CJI Salukan CSR di Desa Sepanjang

¹³ Wartabromo (2018). Hardiknas, PT CJI Serahkan Santunan dan Beasiswa Pendidikan kepada 354 Pelajar. www.wartabromo.com. Diakses pada 2 Juni 2018.

Indonesia di Kabupaten Pasuruan. Humas PT CJI, Mashudi Junus mengatakan, pihaknya ingin membantu meringankan beban para korban bencana banjir melalui pendirian dapur umum di 6 desa di Kecamatan Rejoso dan Grati.¹⁴



¹⁴ Wartabromo (2017). *Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir, PT CJI Dirikan 6 Posko Dapur Umum*. Diakses pada 9 Agustus 2017.

BAB 5

PELAKSANAAN CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PT. CHEIL JEDANG INDONESIA DI KABUPATEN PASURUAN: DESKRIPSI MELALUI PERSPEKTIF GOVERNANCE

5.1 Relasi Pemerintah dan *Civil Society* Dalam Pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Cheil Jedang Indonesia Di Kabupaten Pasuruan

Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsep pemerintahan (*governance*) dengan pola pemerintahan tradisional adalah terletak pada tuntutan peran pemerintah yang dikurangi dan peran masyarakat termasuk swasta dan lembaga swadaya ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya.¹ Dari sinilah muncul pemikiran baru yang mengarah pada perubahan pola penyelenggaraan pemerintahan dari pola pemerintahan tradisional menjadi pola baru yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan sektor swasta dan masyarakat.

Governance adalah studi tentang *network* yang menekankan pada peran beragam aktor sosial dalam sebuah jejaring negosiasi, implementasi, dan pembagian hasil.² Tidak heran jika dalam *Governance*, swasta diberikan ruang sebagai bagian yang sangat penting dalam pembangunan untuk terlibat. Hal ini mengingat swasta memiliki peran andil dalam kemitraan dengan masyarakat dan pemerintah. Tujuannya untuk mensinergikan kepentingan dan saling mendukung untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.

¹ Sedarmayanti, 2012. *Good Governance. Pemerintahan Yang Baik Bagian Kedua*. Bandung, CV. Mandar Maju, hlm 5

² H. Sukardi. *Good Governance: Reposisi Administrasi Publik, Lensa Kapital Sosial*. Jurnal Administrasi Publik, hlm. 29

Dalam *governance*, pola interaksi dan kolaborasi antara Pemerintah, swasta dan masyarakat yang sering disebut dengan istilah kemitraan, semakin dituntut untuk lebih diimplementasikan pada berbagai sektor, seperti dalam pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, termasuk juga *CSR (Corporate Social Responsibility)* atau juga bisa disebut tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan *output* dari kebijakan Pemerintah tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh Perusahaan dan diberikan kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan konsep *governance* yaitu relasi 3 sektor yaitu Pemerintah, sektor swasta dan masyarakat yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan publik.

Menurut Federickson, *Governance* sebagai tempat berhimpunnya berbagai pluralitas pelaku bahkan disebut sebagai hiper pluralitas untuk membangun sebuah konser antar pihak-pihak yang berkaitan secara langsung atau tidak (*stake holders*) dapat berupa: partai politik, lembaga pemerintah dan divisinya, kelompok kepentingan termasuk swasta dan masyarakat (*civil society*), untuk menyusun pilihan-pilihan kebijakan seraya mengimplementasikan.³ Dalam proses pembuatan kebijakan tentang tanggung jawab sosial perusahaan, dalam wawancara terhadap Humas PT. CJI, beliau mengatakan bahwa pihaknya dan perwakilan masyarakat (*civil society*) telah ikut berpartisipasi dalam diskusi pembuatan kebijakan tentang tanggung jawab sosial perusahaan yaitu Undang-undang dasar No. 40 tahun 2007.⁴

³ H. Sukardi. *Good Governance: Reposisi Administrasi Publik, Lensa Kapital Sosial*. Jurnal Administrasi Publik, hlm. 28

⁴ Wawancara dengan Mashudi Junus selaku Humas PT.CJI Pasuruan pada 10 September 2017

Program dan kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT. CJI di Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu bentuk kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan juga pelestarian lingkungan. Perencanaan dalam program dan kegiatan CSR PT. CJI di Kabupaten Pasuruan harus terdapat keterlibatan dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat seperti dalam teori *governance*. Pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pembuat kebijakan, sedangkan dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa dan Kecamatan, sedangkan pihak swasta yang dimaksud adalah PT. CJI di Kabupaten Pasuruan, dan masyarakat termasuk adalah yang menerima program dan kegiatan CSR dari PT. CJI di Kabupaten Pasuruan termasuk juga (*civil society*).

Dalam perencanaan program dan kegiatan CSR itu sendiri, masyarakat yang menerima program CSR dan pemerintah desa setempat sudah dilibatkan, seperti wawancara dengan Humas PT. CJI di Kabupaten Pasuruan yang mengatakan:

“Berawal dari komunikasi dari tiga pilar itu, jadi dengan masyarakat, pemerintah dan dengan perusahaan, jadi dari tiga komponen itu hingga dijadikan suatu skala prioritas, Jadi bukan bentuknya *top-down*, jadi usulan-usulan dari masyarakat juga”.⁵

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok masyarakat (*civil society*) yang akan menerima program dan kegiatan CSR PT. CJI di Kabupaten Pasuruan sudah dilibatkan dengan cara memberikan usulan atau masukan kepada PT. CJI untuk dijadikan program dan kegiatan CSR, sedangkan Pemerintah juga

⁵ *Ibid*

dilibatkan dalam proses perencanaan program dan kegiatan CSR sehingga didapatkan program dan CSR apa yang menjadi skala prioritas.

Hal penting lainnya yaitu adanya forum musyawarah sebagaimana relasi dalam *governance*, dalam proses perencanaan program dan kegiatan CSR, PT. CJI ikut serta dalam forum musyawarah, seperti pada wawancara terhadap Humas PT. CJI yang mengatakan bahwa: *“Di Desa itu ada, kalau usulan-usulan Desa itu masuk musrenbangdes, kemudian bisa masuk ke Kecamatan, biasanya tiap tahun itu dilakukan, musrenbang kabupaten juga ada, biasanya kami ikut”*.⁶

Program dan kegiatan CSR oleh PT. CJI dilakukan sebelum adanya kebijakan pemerintah tentang tanggung jawab sosial perusahaan, hal tersebut tampak pada program dan kegiatan CSR PT. CJI yaitu normalisasi sungai yang telah dilakukan sejak Tahun 2004 padahal Undang-undang tentang tanggung jawab sosial perusahaan baru dibuat pada tahun 2007, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang tanggung jawab sosial perusahaan baru dibuat pada tahun 2012. Namun dalam penelitian ini hanya membahas pada pelaksanaan program dan kegiatan CSR PT. CJI pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2016-2018.

Dana yang disediakan PT. CJI dalam pelaksanaan CSR cukup besar, contohnya pada program CSR yang berupa instalasi pompa air di Dusun Sarirejo, Desa Arjoasi Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan yang bernilai lebih dari 500 Juta Rupiah. Program tersebut dibuat untuk untuk mencukupi kebutuhan air bersih bagi warga Dusun Sarirejo, yang memiliki populasi kurang lebih 1.100 jiwa,

⁶ *Ibid*

sedangkan dalam kegiatan CSR yang berupa normalisasi sungai di Rejoso, PT. CJI menyediakan dana sebesar 120 Juta Rupiah, normalisasi sungai tersebut merupakan program berkelanjutan sejak tahun 2004. Kemudian ada juga program dan kegiatan CSR yang dilakukan setiap tahun contohnya adalah pemberian hewan 100 hewan kurban sebagai bentuk kepedulian menyambut hari raya Idul Adha yang tidak pernah ditinggalkan. Namun untuk dana yang disediakan PT. CJI untuk pelaksanaan program dan kegiatan CSR, pihaknya tidak memberitahukan.

Gambar 5.1.1 Pemberian hewan kurban untuk menyambut Idul Adha



Sumber: wartabromo.com, 2017

Setelah itu, 100 hewan kurban tersebut disebar kurang lebih ke 63 sasaran, mulai masjid, pondok pesantren, yayasan sosial, Desa hingga instansi pemerintah. Beberapa juga sudah diserahkan terimakan ke Bapak Bupati Pasuruan melalui Pak Camat Rejoso mewakili Pemerintah Kabupaten Pasuruan.⁷

Sedangkan dalam proses pelaksanaannya, masyarakat dan pemerintah juga ikut berpartisipasi dalam proses jalannya program dan kegiatan CSR PT. CJI. Contohnya pada kegiatan normalisasi Sungai Rejoso selalu bekerja sama dengan pihak Pemerintah Desa, dengan pemberitahuan kepada Bupati, Dinas Pengairan, dan Kecamatan Rejoso. Masyarakat sekitar juga dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam proses pelaksanaan kegiatan CSR PT. CJI. Contohnya pada kegiatan CSR PT. CJI yang berupa normalisasi sungai Rejoso untuk mengantisipasi banjir, PT. CJI menunjuk tenaga padat karya agar bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Normalisasi Sungai Rejoso ini merupakan program CSR PT. CJI yang berkelanjutan sejak Tahun 2004.⁸

Gambar 5.1.2 Revitalisasi Sungai Rejoso untuk mengantisipasi banjir

⁷ Wartabromo (2017). *Mantapkan Kepedulian dan Empati, PT CJI Bagikan 100 Hewan Kurban ke Warga Sekitar*. www.wartabromo.com. Diakses pada 9 Agustus 2017

⁸ Wartabromo (2016). *Antisipasi Banjir, PT Cheil Jedang Indonesia Normalisasi Sungai Rejoso*. www.wartabromo.com. Diakses pada 9 Agustus 2017



Sumber: wartabromo.com, 2016

Dalam bidang pendidikan, PT. CJI di Kabupaten Pasuruan memberikan beasiswa pendidikan dan santunan kepada ratusan pelajar warga sekitar wilayah Kecamatan Rejoso Pada tanggal 23 Mei 2017. Beasiswa untuk pengembangan pendidikan tersebut sedikitnya diberikan kepada 331 siswa yang berada di sekitar lokasi pabrik, mulai dari tingkatan SD hingga SLTA.⁹ Kegiatan pemberian beasiswa dan santunan tersebut dilakukan di aula lokasi pabrik, dihadiri langsung oleh *Vice President* PT. CJI di Kabupaten Pasuruan, Direktur Administrasi PT. CJI, dan sejumlah Kepala Desa wilayah Kecamatan Rejoso. Hal ini dikatakan sebagai salah satu upaya untuk terus menjaga kepedulian PT. CJI terhadap tumbuh kembang maupun pendidikan anak-anak warga sekitar.

Di beberapa program dan kegiatan CSR PT. CJI di Kabupaten Pasuruan juga sudah melibatkan (*civil society*) sebagai pendorong terlaksananya program dan kegiatan CSR PT. CJI di Kabupaten Pasuruan, pemerintah juga dilibatkan dalam

⁹ Wartabromo (2017). *Buktikan Peduli dan Tidak Berjarak, PT. CJI Beri Beasiswa Kepada Ratusan Pelajar*. www.wartabromo.com. Diakses pada 9 Agustus 2017

pengawasan terhadap kegiatan *CSR* yang dilakukan. contohnya dalam program dan kegiatan *CSR* PT. CJI di Kabupaten Pasuruan yang bekerja sama dengan warga dan kelompok tani yang melakukan penanaman 4000 pohon di Sumber Mata Air Mbah Main Dusun Siring Desa Kemiri Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan, Rabu 12 April 2017.

Selain itu, Program dan kegiatan *CSR* PT. CJI di Kabupaten Pasuruan sebagai bentuk rasa simpati dan kepedulian terhadap para korban banjir terutama di wilayah Kecamatan Rejoso, Grati dan sekitarnya di Tahun 2017, PT. CJI di Kabupaten Pasuruan membantu meringankan beban para korban bencana banjir melalui pendirian dapur umum di 6 desa di Kecamatan Rejoso dan Grati.

Gambar 5.1.3 Penyediaan dapur umum untuk membantu korban banjir



Sumber: wartabromo.com, 2017

Dapur umum tersebut bertugas menyalurkan bantuan logistik berupa makanan dan minuman kepada para korban banjir yang dilakukan secara bersama – sama bersama warga, Fatayat NU, Muslimat serta pihak desa setempat.

Keterlibatan ketiga sektor tersebut sesuai dengan teori governance, dimana ketiga sektor punya tugas dan fungsi masing-masing. Fatayat NU (*civil society*) yang menjadi pendorong terlaksananya program CSR tersebut dan Pemerintah desa yang bertugas untuk melakukan pengawasan, kemudian PT. CJI yang menyediakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait masalah banjir.

Selain partisipasi dan keterlibatan, Pemerintah, swasta dan masyarakat madani, transparansi juga merupakan aspek penting dalam relasi tiga sektor yang termasuk dalam *governance* agar terciptanya kepercayaan satu sama lain dalam mengatasi masalah masalah kepublikan , transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi semua orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mulai dari informasi tentang kebijakan, proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan.

CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan *output* dari kebijakan pemerintah, maka dari itu program dan kegiatan CSR juga harus transparan. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab merupakan salah satu *governance*. Untuk prosedur PT. CJI sudah mempunyai tahap- tahap yang jelas, sedangkan dalam biaya, melalui Humas PT. CJI dalam wawancara yang sudah dilakukan, pihaknya mengaku mempunyai anggaran khusus untuk program dan kegiatan CSR-nya, namun untuk nominalnya pihaknya tidak memberitahukan berapa jumlah keseluruhan yang dianggarkan

untuk program dan kegiatan CSR tersebut.¹⁰ Akan tetapi pada beberapa program dan kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT. CJI, pihaknya memberitahukan anggaran yang dikeluarkan, contohnya pada instalasi pompa air di Desa Arjosari yang bernilai sekitar 500 juta Rupiah, dan revitalisasi sungai Rejosari untuk mengantisipasi banjir setiap tahunnya PT. CJI menyediakan dana sebesar 120 juta.

Informasi juga penting dalam relasi antar 3 sektor yang termasuk dalam *governance* untuk saling berhubungan satu sama lain agar tercapai tujuan kepublikan, untuk informasi mengenai program dan kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT. CJI, informasi bisa didapatkan dari Kepala Desa setempat, seperti pada wawancara kepada Bapak Ciko selaku Kepala Desa Kemantren Rejo yang mengatakan bahwa: *“Kalau informasi, masyarakat bisa tanya ke kita langsung itu tentang CSR nya PT. CJI yang mau buat, kalau itu kita memberi informasi secara terbuka”*.¹¹ Dan untuk program dan kegiatan CSR yang pernah dilakukan oleh PT. CJI, masyarakat bisa melihat di media masa *online*, karena banyak dari program kegiatan CSR PT. CJI yang sudah diliput oleh media masa *online*. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sudah diberikan kemudahan akses informasi baik melalui Pemerintah yaitu Kepala Desa dan pihak swasta yaitu PT. CJI itu sendiri.

Masyarakat juga harus dilibatkan dalam pelaksanaan, mengingat masyarakat juga merupakan salah satu dari tiga aktor yang termasuk dalam *governance*. Dalam pelaksanaan CSR PT. CJI, masyarakat diberikan kesempatan

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Wawancara dengan Kepala Desa Kemantren Rejo, Kecamatan Rejosari Kabupaten Pasuruan pada 3 Oktober 2017

untuk memberikan masukan dan keluhan yang dirasakan untuk diproses dalam program dan kegiatan *CSR* PT. CJI, dalam wawancara terhadap Humas PT. CJI beliau mengatakan bahwa program dan kegiatan *CSR* memang dibuat dari keluhan dan saran dari warga sekitar, kepala desa juga dilibatkan dalam menampung saran dan keluhan dari masyarakat, dan nanti akan dibuat mana program yang diprioritaskan.¹² Hal tersebut juga berkaitan dengan teori *governance* untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak.

Setelah program dan kegiatan tersebut terlaksana, PT. CJI di Kabupaten Pasuruan melakukan evaluasi, terdapat juga laporan dari program dan kegiatan *CSR* PT. CJI di Kabupaten Pasuruan setiap 6 bulan sekali, laporan tersebut dilaporkan kepada sekretariat bersama dalam forum pelaksana *CSR*, forum tersebut adalah forum dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pasuruan yang sudah mempunyai program dan kegiatan *CSR*. Kedua hal tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan dengan pihak-pihak lain selain PT. CJI dalam pelaksanaan *CSR* yang sesuai dengan *networking* dalam *governance*.

Masyarakat (*civil society*) penerima program *CSR* itu sendiri juga masih terlibat dalam program dan kegiatan *CSR* setelah program dan kegiatan *CSR* itu dibuat yaitu melakukan perawatan terhadap fasilitas yang sudah diberikan oleh PT. CJI di Kabupaten Pasuruan, contohnya pada program dan kegiatan *CSR* PT. CJI di Kabupaten Pasuruan yang berupa instalasi pompa air, setelah pompa air tersebut selesai dibuat, masyarakat (*civil society*) sekitar yang berkepentingan yang akan

¹² Wawancara dengan Mashudi Junus selaku Humas PT.CJI Pasuruan pada 10 September 2017

merawat pemeliharaan pompa air tersebut, namun untuk biaya listrik ditanggung oleh PT. CJI di Kabupaten Pasuruan. Masyarakat merasa sangat terbantu oleh program ini, seperti yang diungkapkan salah satu warga di Desa Kemantren Rejo Kecamatan Rejos Kabupaten Pasuruan: *“Kalau saya dan masyarakat sekitar merasa s dibantu dengan program pompa air ini, sejak dibangunnya pompa air di sini masyarakat sudah tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan sumber air bersih”*.¹³ Kepuasan masyarakat ini menandakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT. CJI sudah merespon kebutuhan masyarakat.

Governance berkaitan dengan suatu level kelembagaan yang meliputi nilai-nilai, peraturan-peraturan formal dan informal termasuk kebijakan. Maka dari itu program dan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan oleh PT. Cheil Jedang Indonesia di Kabupaten Pasuruan juga harus sesuai dengan kebijakan Pemerintah tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Kebijakan Pemerintah tentang tanggung jawab sosial perusahaan tersebut antara lain adalah Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 tentang tanggung jawab sosial perusahaan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 31 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial perusahaan pada Pasal 74 menjelaskan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya

¹³ Wawancara dengan Lukman Yudi warga Desa Kemantren Rejo Kec. Rejos Kab. Pasuruan Pada 3 September 2017.

di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”¹⁴. PT. CJI di Kabupaten Pasuruan telah melakukan kegiatan dan program *CSR* dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bantuan usaha, bantuan langsung, dan juga lingkungan seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya

Kemudian masih dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, pada ayat 2 dijelaskan bahwa :

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.

Dalam wawancara terhadap Humas PT. CJI, beliau mengatakan bahwa PT. CJI telah menganggarkan dana untuk *CSR* sebagai biaya Perseroan, namun untuk nominalnya pihaknya tidak bisa menyebutkan.

Selain itu Mashudi Junus selaku Humas PT. CJI mengatakan bahwa kegiatan *CSR* PT. CJI di Kabupaten Pasuruan sudah disesuaikan dengan peraturan pemerintah, undang-undang lingkungan dan pengelolaan sumber daya manusia dan lingkungan yang berbasis pelatihan dan pendidikan agar dapat menambah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta karyawan.¹⁵ Maka dari itu agar pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Cheil Jedang Indonesia berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan pemerintah, PT. CJI di Kabupaten Pasuruan melakukan beberapa tahapan dalam menjalankan program

¹⁴ UU No. 40 Tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial perusahaan, Pasal 74

¹⁵ Wawancara dengan Mashudi Junus selaku Humas PT.CJI Pasuruan pada 10 September 2017

dan kegiatan *CSR*, yakni : tahap perencanaan, tahap implementasi dan tahap evaluasi.

Tahap perencanaan yang dilakukan oleh PT. CJI di Kabupaten Pasuruan yaitu melakukan *social mapping* berdasarkan keluhan dan saran dari warga sekitar dan dibantu oleh kepala desa, tahap perencanaan tersebut sesuai dengan Perda Kabupaten Pasuruan No. 31 Tahun 2012 pasal 11 tentang tanggung jawab sosial perusahaan pada butir pertama yang menjelaskan bahwa:

“Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib: a) menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku”.¹⁶

Setelah adanya perencanaan yang sudah dibuat, tahap selanjutnya adalah tahap implementasi atau pelaksanaan kegiatan dan program *CSR* PT. CJI. Dalam tahapan ini perlu adanya keterlibatan antara Humas, Pemerintah dan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan *CSR* yang sedang dilaksanakan. Keterlibatan beberapa pihak tersebut bertujuan agar program *CSR* yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu dengan adanya keterlibatan dari pihak Humas dan warga maka akan menimbulkan rasa kepemilikan bersama terhadap keberadaan PT. CJI, sehingga dengan adanya kegiatan dan program *CSR* dapat mempererat hubungan antara Humas, pemerintah, dan masyarakat.

Setelah tahap perencanaan dan implementasi, selanjutnya PT. CJI di Kabupaten Pasuruan melakukan tahap evaluasi. Hal ini sudah sesuai dengan Perda

¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 31 Tahun 2012 pasal 11

Kabupaten Pasuruan No. 31 Tahun 2012 pasal 11 tentang tanggung jawab sosial perusahaan pada butir kedua yang menjelaskan bahwa:

“Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib: b) menumbuhkan dan mengembangkan sistem kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dan juga kelestarian lingkungan”.¹⁷

Di dalam tahap ini semua program dan kegiatan *CSR* yang telah dilaksanakan oleh PT. CJI di Kabupaten Pasuruan setidaknya dalam kurun waktu satu tahun akan di evaluasi satu per satu dari semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun terakhir ini. Kegiatan evaluasi ini biasanya melibatkan dua pihak yakni dari pihak PT. CJI di Kabupaten Pasuruan dan perwakilan dari serikat pekerja. Evaluator biasanya dipilih salah satu dari perwakilan dari perusahaan atau perwakilan dari masyarakat yang bersangkutan.

Untuk memenuhi kewajiban suatu perusahaan tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur dalam beberapa kebijakan pemerintah, seperti yang diamanahkan Perda Kabupaten Pasuruan No. 31 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang berlandaskan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Perseroan terbatas dan kebijakan lainnya, begitu juga dengan paradigma 3P yaitu *People*, *Planet*, dan *Profit* yang bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan belaka. PT. CJI di Kabupaten Pasuruan melaksanakan tanggung jawab sosialnya (*CSR*) dalam berbagai bidang seperti, pendidikan, lingkungan, ekonomi, sosial dan lain- lain.

¹⁷ Perda Kabupaten Pasuruan No. 31 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 11

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 31 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan, Pasal 12 menyatakan bahwa: “Program TSP meliputi: a. bina lingkungan dan sosial; b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; c. program langsung pada masyarakat”¹⁸. PT. CJI di Kabupaten Pasuruan sudah mempunyai kegiatan *CSR* yang berupa bina lingkungan, seperti revitalisasi sungai Rejoso untuk mengantisipasi banjir tiap tahunnya dan penanaman 4000 pohon di Kecamatan Puspo.

Gambar 5.1.4 Penanaman 4000 pohon di Kecamatan Puspo



Sumber: wartabromo.com, 2017

Kepala Desa Kemiri, Bapak Sumarlin mengaku sangat senang dengan penanaman ribuan pohon tersebut. Menurutnya, selama ini, baru pertama kali ada perhatian penanaman di wilayahnya. Beliau mengatakan *“Alhamdulillah ini merupakan pertama kalinya ada penanaman ribuan pohon. Kami sangat*

¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 31 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 12

menyambut baik terhadap upaya pelestarian sumber mata air di sini".¹⁹ Sementara Arief Sunaryo selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan Hidup yang ikut hadir dalam pelaksanaan penanaman tersebut menyambut baik upaya perusahaan PT CJI yang berfokus pada konservasi lingkungan hidup. Upaya PT. CJI di Kabupaten Pasuruan tersebut merupakan sinergitas antara masyarakat (*civil society*), pemerintah dan sektor swasta untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan.

Sedangkan untuk program binaan, PT. CJI di Kabupaten Pasuruan di antaranya adalah dibangunnya sekolah sepak bola (SSB), pencak silat hingga kegiatan positif lainnya seperti Qira'at. Sedangkan untuk program kemitraan usaha mikro, PT. CJI membuat beberapa toko untuk warga agar warga dapat mengembangkan usahanya sendiri terlepas dari bantuan perusahaan, dan juga budidaya ikan lele dengan warga dimana program tersebut adalah permintaan dari warga itu sendiri yang diajukan kepada PT. CJI. Namun sayangnya PT. CJI belum mempunyai program kemitraan usaha mikro yang berbentuk koperasi seperti yang tertera pada Pasal 12 dalam Perda Kabupaten Pasuruan No. 31 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Sedangkan untuk program dan bantuan langsung kepada masyarakat, PT. CJI memberikan bantuan beasiswa untuk pelajar dan bantuan- bantuan sosial yang diberikan ke beberapa pondok pesantren untuk kaum dhuafa dan yatim piatu.

¹⁹ Wartabromo (2017). *Jaga Konservasi Alam, PT CJI Tanam 4 Ribu Pohon di Sumber Mata Air Mbah Main Puspo*. www.wartabromo.com. Diakses pada 9 Agustus 2017

Seperti yang telah disebutkan di atas, PT. CJI di Kabupaten Pasuruan memiliki komitmen untuk berupaya menjadi perusahaan yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan kelestarian lingkungan. Mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, kelestarian lingkungan dan bantuan langsung kepada masyarakat. Sedangkan untuk program *CSR* yang berupa kemitraan usaha mikro yang dilakukan oleh PT. CJI seperti pembuatan beberapa toko di Desa Sariarjo dan budidaya ikan lele dengan warga di Desa sedengan yang juga merupakan usulan dari warga itu sendiri, tetapi program tersebut sudah lama dilakukan, sedangkan di Tahun 2016-2018 tidak ada program dan kegiatan *CSR* yang berupa kemitraan usaha mikro. PT. CJI juga belum mempunyai program *CSR* kemitraan usaha yang berbentuk koperasi.²⁰

Dalam peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. No. 31 Tahun 2012 Pasal 16, perusahaan diwajibkan bergabung dalam forum pelaksana *CSR* agar program-program TSP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien. PT. CJI sudah bergabung dan merupakan salah satu inisiator terbentuknya forum pelaksana *CSR* di kabupaten Pasuruan maupun Provinsi.²¹ PT. CJI juga sudah melaporkan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi *CSR* kepada sekretariat bersama dalam forum pelaksana *CSR* seperti yang diatur dalam Pasal 18 Perda Kabupaten Pasuruan No. 31 Tahun 2012. Dalam forum tersebut tidak terdapat keterlibatan dengan Pemerintah dan masyarakat (*civil society*).

²⁰ Wawancara ke-2 dengan Mashudi Junus selaku Humas PT.CJI pada 4 Oktober 2017.

²¹ *Ibid*

5.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Cheil Jedang Indonesia Di Kabupaten Pasuruan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan CSR oleh PT. CJI tentu tidak lepas dari faktor pendukung dan penghambat. PT. CJI di Kabupaten Pasuruan hanya memiliki staf Humas yang berjumlah 5 orang untuk pelaksanaan program dan kegiatan CSR, jumlah tersebut terbilang sedikit mengingat PT. CJI merupakan perusahaan besar yang berskala Internasional yang memiliki ribuan karyawan baik dari perusahaan inti maupun dari pihak *outsourcing*, dan juga mengingat Staf Humas PT. CJI yang tidak hanya bertugas dalam pelaksanaan CSR saja namun juga semua yang berkaitan dengan masyarakat. Hal tersebut membuat pelaksanaan program dan kegiatan menjadi kurang efektif. Namun dalam hal kualitas, Humas PT. CJI rata – rata sudah memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 Tahun di perusahaan tersebut

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial merupakan sesuatu yang penting untuk pelaksanaan program dan kegiatan CSR agar pelaksanaan program dan kegiatan PT. CJI lebih efektif. Dalam hal sumber daya finansial, PT. CJI merupakan perusahaan besar berskala internasional yang mempunyai anggaran yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), terbukti dari program CSR yang dilakukan oleh PT. CJI di Kabupaten Pasuruan yang nilainya tergolong cukup besar, contohnya saja program CSR PT. CJI yang berupa pembangunan instalasi pompa air untuk warga sekitar yang bernilai lebih dari 500

juta.²² Dana kompensasi yang diberikan PT. CJI terkait limbah perusahaan terhadap masyarakat sekitar yang nilainya 600 juta per tahun juga tergolong cukup besar. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu faktor pendukung dari pelaksanaan program dan kegiatan CSR oleh PT. CJI di Kabupaten Pasuruan.

Keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT. CJI seperti yang sudah dibahas juga merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT. CJI. Dengan adanya keikutsertaan pemerintah dan masyarakat tersebut dapat membantu pelaksanaan CSR PT. CJI di Kabupaten Pasuruan, seperti pada revitalisasi sungai, PT. CJI di Kabupaten Pasuruan meminta bantuan kepada 5 Kepala Desa di wilayah kecamatan Rejoso.²³ Tenaga kerja dalam pengelolaannya juga merupakan tenaga padat karya dari warga sekitar.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT. CJI tentu tidak lepas dari masalah yang menghambat pelaksanaan CSR tersebut. Salah satu hambatan terbesar PT. CJI dalam pelaksanaan CSR adalah perbedaan kebutuhan yang terjadi di masyarakat, dan tidak semua pihak akan merasa puas dengan program CSR yang akan dilakukan. Banyak sekali warga yang mengajukan program dan kegiatan CSR untuk kepentingan pribadi, maka dari itu PT. CJI melibatkan kepala desa untuk menampung saran dan keluhan warga yang kemudian akan dipilih mana program dan kegiatan CSR yang menjadi prioritas²⁴. Kurangnya

²² *Ibid*

²³ Wartabromo (2016). *Antisipasi Banjir, PT Cheil Jedang Indonesia Normalisasi Sungai Rejoso*. www.wartabromo.com. Diakses pada 9 Agustus 2017

²⁴ *Ibid*.

pemahaman masyarakat tentang program *CSR* juga merupakan hambatan dalam pelaksanaan *CSR*, karena tidak semua masyarakat memahami konsep mengenai *CSR*. Hal itu tampak ketika pelaksanaan program *CSR*, masyarakat lebih memilih uang daripada mendapatkan bantuan berupa fasilitas umum atau kegiatan pelestarian lingkungan. Hal tersebut menandakan kurangnya informasi yang diberikan baik dari Pemerintah tentang kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan maupun dari pihak PT. CJI tentang program dan kegiatan *CSR*. Tidak adanya LSM yang berkaitan dengan program dan kegiatan *CSR* yang dilakukan PT. CJI di Kabupaten Pasuruan menandakan masyarakat juga kurang aktif dalam memenuhi kepentingan publik masyarakat sekitar terkait konsep *governance*

Maka dari itu, untuk mengatasi hambatan pada pelaksanaan *CSR* tersebut PT. CJI melakukan beberapa hal untuk mengatasinya, antara lain:

1. PT. CJI melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program dan kegiatan *CSR* yang akan dilakukan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup di bidang ekonomi, sosial, lingkungan dan lain- lain. Komunikasi tersebut berupaya agar semua pihak merasa diuntungkan, dan jika ada sebagian pihak yang merasa belum terbantu dengan program *CSR* tersebut maka akan dijadikan program *CSR* selanjutnya.
2. PT. CJI di Kabupaten Pasuruan menjelaskan bahwa pihaknya akan berupaya mengelola limbah dengan sebaik- baiknya agar masyarakat sekitar tidak merasa terganggu dengan kegiatan produksi PT. CJI di Kabupaten Pasuruan. PT. CJI juga memberikan dana kompensasi sebesar 600 Juta

pertahun, sayangnya dalam wawancara yang dilakukan peneliti, Humas PT.

CJI tidak mau menjelaskan dana tersebut secara rinci dan ke mana arah tujuannya.

Kunjungan dan pertemuan dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta dan penyebaran informasi ke media massa yang menekankan pada proses yang dilakukan oleh PT. CJI di Kabupaten Pasuruan dalam program dan kegiatan *CSR*. Hal tersebut dapat dilihat dari banyak Program dan kegiatan *CSR* PT. CJI di Kabupaten Pasuruan yang diliput di media masa, salah satunya adalah media online wartabromo yang banyak meliput program dan kegiatan *CSR* PT. CJI di Kabupaten Pasuruan.

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan atas teori, konsep maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Ketiga sektor yang dimaksud dalam *governance* yaitu pemerintah, sektor swasta dan *civil society* memiliki hubungan dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan CSR PT. CJI di Kabupaten Pasuruan, antara lain:
 - a). Dalam proses pembuatan kebijakan Pemerintah tentang tanggung jawab sosial perusahaan sudah terdapat relasi antar tiga sektor terkait *governance*. Yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan, PT. CJI di Kabupaten Pasuruan dan perwakilan masyarakat (*civil society*).
 - b). Dalam proses perencanaan program dan kegiatan CSR PT. CJI sudah terdapat keterlibatan tiga sektor terkait *governance*. Yaitu pemerintah desa setempat sebagai penentu program yang diprioritaskan, kelompok masyarakat (*civil society*) dalam memberikan saran, dan PT. CJI itu sendiri.
 - c). Beberapa pelaksanaan program dan kegiatan CSR PT. CJI sudah melibatkan pemerintah dan (*civil society*) sebagai pendorong terlaksanakannya program dan kegiatan CSR PT. CJI di Kabupaten Pasuruan.

e). Dalam forum pelaksana CSR di Kabupaten Pasuruan yang beranggotakan PT. CJI di Kabupaten Pasuruan dan perusahaan lain di Kabupaten Pasuruan yang melaksanakan program dan kegiatan CSR, tidak terdapat keterlibatan Pemerintah dan masyarakat (*civil society*) dalam forum tersebut

d). Pelaksanaan CSR PT.CJI di Kabupaten Pasuruan secara umum juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi masih kurangnya program dan kegiatan CSR PT. CJI tahun 2016-2018 dalam bentuk kemitraan usaha mikro dan koperasi.

2. Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan CSR PT. CJI di Kabupaten Pasuruan, yaitu:

Faktor Pendukung

- a. Adanya sumber daya finansial yang cukup besar sehingga mendukung pelaksanaan CSR PT. CJI di Kabupaten Pasuruan yang dapat dilihat dari anggaran yang dikeluarkan oleh PT. CJI di Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan program dan kegiatan CSR.
- b. Adanya Partisipasi dan keterlibatan pemerintah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan CSR PT.CJI di Kabupaten Pasuruan. Hal tersebut sangat membantu proses pelaksanaan program dan kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT. CJI di Kabupaten Pasuruan.

- c. Sumber daya manusia pada Humas PT. CJI yang cukup dan berpengalaman yang lebih dari 10 Tahun telah bekerja di PT. CJI di Kabupaten Pasuruan.

Faktor Penghambat

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar tentang *CSR*, hal ini disebabkan kurangnya informasi dan sosialisasi oleh Pemerintah dan PT. CJI di Kabupaten Pasuruan.
- b. Perbedaan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, masalah sosial di masyarakat yang kompleks membuat kebutuhan masyarakat di tiap-tiap daerah dan lingkungan berbeda-beda satu sama lain.
- c. Tidak terdapat LSM yang terlibat dalam program dan kegiatan *CSR* yang dilakukan PT.CJI di Kabupaten Pasuruan.
- d. Kurangnya Humas PT. CJI di Kabupaten Pasuruan, jumlah Humas PT. CJI di Kabupaten Pasuruan hanya berjumlah 5 orang, jumlah yang sedikit tersebut menjadi salah satu hambatan bagi pelaksanaan program dan kegiatan *CSR* yang dilakukan oleh PT. CJI di Kabupaten Pasuruan.

6.2 Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah narasumber yaitu wawancara kepada beberapa instansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan seperti BLH, Bappeda dan sebagainya yang berkaitan dengan *CSR*. Hal ini penting, mengingat penelitian yang dilakukan berkaitan dengan *governance*.

Penelitian selanjutnya diharapkan lebih menggali secara mendalam peran *civil society* dalam pelaksanaan program yang dilakukan perusahaan baik *CSR* maupun program lainnya, mengingat masyarakat madani merupakan salah satu dari tiga elemen dalam relasi *governance*

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hetifa Sj, Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia
- Kartini, Dwi. 2009. *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasinya di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Agus Erwan dan Dyah R.S. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance. Pemerintahan Yang Baik Bagian Kedua*. Bandung, CV. Mandar Maju.
- Silalahi, Uber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Solihin, Ismail. 2008. *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba empat.
- Subarsono, Ag. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Gresik: Fascho Publishing.
- Widodo, Joko. 2012. *Analisis Proses Implementasi Kebijakan Publik*, Malang: Bayu Media Publishing
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Dokumen:

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Internet:

Bagus, Rahadian. 2014. *Bupati Irsyad Yusuf Kaji Ulang Perda CSR*. www.surabaya.tribunnews.com

Rumengan, Muhammad Rudi. *Pengentasan kemiskinan melalui tanggung jawab sosial perusahaan*. www.kompasiana.com

Tabloidbongkar. 2016. *BLH Layangkan Surat Teguran Kepada PT. Cheil Jedang Indonesia*. www.tabloidbongkar.com

Wartabromo. 2015. *Dipertanyakan Warga, PT. CJI di Kabupaten Pasuruan Akui Telah Serahkan Rp 1,2 M di Kecamatan*. www.wartabromo.com

_____. 2016. *Antisipasi Banjir, PT Cheil Jedang Indonesia Normalisasi Sungai Rejoso*. www.wartabromo.com

_____. 2017. *Buktikan Komitmen, PT. CJI Bangun Pompa Air Bersih Ke Warga Arjosari*. www.wartabromo.com

_____. 2017. *Buktikan Peduli dan Tidak Berjarak, PT. CJI Beri Beasiswa Kepada Ratusan Pelajar*. www.wartabromo.com

_____. 2017. *Jelang Hari Raya, PT. CJI Rejoso Sebar Bantuan Sosial ke Ponpes dan Yayasan*. www.wartabromo.com

_____. 2017. *Mantapkan Kepedulian dan Empati, PT. CJI di Kabupaten Pasuruan Bagikan 100 Hewan Kurban ke Warga Sekitar*. www.wartabromo.com

_____. 2017. *Wujudkan Generasi Qur'ani, PT. CJI di Kabupaten Pasuruan dan Fushilat Gelar Festival Anak Santri Indonesia*. www.wartabromo.com

Widianto, Eko. 2012. *Protes Pencemaran, Warga Pasuruan Blokade Jalan*. www.tempo.co

Yoenanto, Ari. 2012. *Buang Limbah, Nelayan Demo PT. CJI di Kabupaten Pasuruan*. www.sindonews.com.

Karya Ilmiah:

Akib, Haedar. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010

Cheng, Megawati dan Yulius Jogi Christiawan. *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Abnormal Return*. Jurnal akuntansi dan keuangan, vol. 13, no. 1, Mei 2011: 24-36

Ramdhani, Abdullah dan Muhammad Ali Ramdhani. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik, Volume 11 No. 01 Tahun 2017

Suastuti, Eny. *Beberapa kendala dalam penerapan CSR (analisis pasal 74 uupt)* Modifikasi dari *Implementation Of The Law Enforcement corporate Social Responsibility (CSR) In Article 74 laws On Limited Liability* yang disampaikan pada International Conference CSR Sustainable Development pada tanggal 9-11 April 2013

Sukardi, H. *Good Governance: Reposisi Administrasi Publik, Lensa Kapital Sosial*. Jurnal Administrasi Publik